



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

Ciamis, 28 April 2025

Nomor : 000.7.2/ 99 /DPRD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Keputusan
Pimpinan DPRD

Yth. Bupati Ciamis

di-

C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur “Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

Sehubungan ketentuan dimaksud, bersama ini disampaikan Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.5/DPRD/2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024.

Demikian mohon maklum, dan menjadi bahan lebih lanjut.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,


NANANG PERMANA, M.H

Tembusan :

- Yth. 1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Barat.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.5/DPRD/2025

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerbitkan rekomendasi;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024 telah dibahas oleh Gabungan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.2/DPRD/2025;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 0007.2/726/Bapp.02/2025 tanggal 19 Maret 2025 Hal Penyampaian LKPJ Bupati Ciamis Tahun 2024;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 20 Maret 2025;

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 24 Maret 2025.
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 28 April 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Ciamis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ciamis Tahun 2024 berupa catatan strategis yang berisikan saran masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis ke depan.
- KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



NANANG PERMANA

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

TERHADAP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIAMIS TAHUN 2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

LAPORAN

**KOMISI A
BIDANG PEMERINTAHAN
DPRD KABUPATEN CIAMIS**

YANG BERTUNGAS MEMBAHAS

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

LAPORAN KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD

SEJENAK KITA BERSERAH DIRI BERLINDUNG DAN MEMOHON PERTOLONGAN KEHADIRAT ILLAHI RABBI, DZAT YANG MAHA GHAPUR ALLAH SWT YANG TIDAK PERNAH BERHENTI MEMBERIKAN RAHMAT DAN RIDHA NYA, SEHINGGA ATAS IZIN DAN PERTOLONGAN-NYA KITA DIBERI KESEMPATAN UNTUK SAMA-SAMA HADIR DI TENGAH-TENGAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD SEBAGAI BAGIAN DARI RANGKAIAN KEGIATAN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024.

PENGHORMATAN DAN KESELAMATAN SENANTIASA TERCURAH LIMPAHKAN KEPADA TAULADAN HIDUP KITA RASULULLAH MUHAMMAD SAW, SEORANG PEMIMPIN TERBESAR DI DUNIA YANG BELUM ADA TANDINGANNYA, SEORANG PEMIMPIN YANG *SHIDIQ DAN AMANAH*, SEORANG PEMIMPIN YANG *TABLIGH*, DAN *FATHONAH*. SEORANG PEMIMPIN YANG MEMILIKI TUTUR KATA, SIKAP DAN PERILAKU YANG SUNGGUH MULIA, YANG MENEDUHKAN KEHIDUPAN UMAT, KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA. SETIDAKNYA KITA BERHARAP UNTUK DAPAT MENJADI PARA PENGIKUTNYA YANG SENANTIASA TAAT DAN PATUH TERHADAP RISALAHNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

HADIRIN SIDANG RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI, KOMISI A DPRD MENEMPUH PROSEDUR SERTA TAHAPAN – TAHAPAN YANG

SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN SELURUH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KOMISI A MENYAMPAIKAN LAPORAN PEMBAHASAN INI DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PEMBAHASAN
- II. KESIMPULAN
- III. REKOMENDASI
- IV. PENUTUP

I. PEMBAHASAN

DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM MEMBAHAS LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024, MENGACU PADA DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, KHUSUSNYA RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, PERDA TENTANG APBD TA. 2024 TERUTAMA UNTUK MELIHAT APAKAH MISI YANG DILAKSANAKAN OLEH BUPATI CIAMIS DALAM RANGKA MENCAPAI VISI, TELAH MENGINDIKASIKAN PENCAPAIAN KINERJA SEBAGAIMAN TELAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024 ATAU BELUM. SEMENTARA RKPD DIPERGUNAKAN UNTUK MELIHAT APAKAH PROGRAM-PROGRAM YANG TERTUANG DI DALAMNYA TELAH DILAKSANAKAN SESUAI TARGET SEHINGGA MENUNJANG PENCAPAIAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN. SEMENTARA KUA DAN PPAS SERTA APBD TA. 2024 DIPERGUNAKAN UNTUK MELIHAT APAKAH KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PPAS YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, TELAH DIJALANKAN DENGAN BENAR SEHINGGA TIDAK MENYIMPANG DARI NOTA KESEPAKATAN.

SECARA TEKNIS PENILAIAN DPRD TERFOKUS PADA PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAIK BERKENAAN DENGAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM ATAU KEGIATAN DAN KINERJA KEUANGAN SERTA BAGAIMANA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEBIJAKAN, SEHINGGA PADA GILIRANNYA MISI YANG DIEMBAN OLEH BUPATI DAPAT DICAPAI DENGAN TEPAT PADA WAKTUNYA.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA PROGRAM ATAU KEGIATAN DAN KINERJA KEUANGAN DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DENGAN REALISASINYA, SEDANGKAN TERHADAP KINERJA KEBIJAKAN DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DENGAN KEBIJAKAN YANG DIINGINKAN OLEH KEBIJAKAN TERSEBUT.

A. DASAR HUKUM PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

DASAR HUKUM PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DUA KALI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. KEPUTUSAN DPRD CIAMIS NOMOR 188.4/Kep.2/DPRD/2025 TENTANG PENUNJUKAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024.

B. MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI DILAKUKAN DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, DENGAN TAHAPAN – TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYUSUNAN JADUAL PEMBAHASAN KOMISI A
2. STUDI DOKUMENTER, YAKNI MENELA'AH DAN MENGAJI SECARA CERMAT DAN SEKSAMA DOKUMEN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024, DOKUMEN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KAUPATEN CIAMIS TAHUN 2024, RKPD TAHUN 2024, APBD TAHUN 2024 DAN DOKUMEN LAINNYA.
3. RAPAT KERJA DENGAN MITRA KERJA KOMISI A
4. PENYUSUNAN LAPORAN PEMBAHASAN.
5. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT KERJA :

1. HARI : RABU DAN KAMIS
2. TANGGAL : 9 DAN 10 APRIL 2025
3. PUKUL : 09.00 WIB DAN 13,00 WIB
4. ACARA : PEMBAHASAN LKPJ BUPOATI CIAMIS TAHUN 2024
5. TEMPAT : RUANG RAPAT KOMISI A DPRD KABUPATEN CIAMIS

D. YANG DI UNDANG :

1. INSPEKTUR KABUPATEN CIAMIS.
2. KEPALA DISDUKCAPIL KABUPATEN CIAMIS
3. KEPALA DINAS PMD KABUPATEN CIAMIS
4. KEPALA BKPSDM KABUPATEN CIAMIS

5. KEPALA SATPOL PP KABUPATEN CIAMIS.
6. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN CIAMIS
7. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIAMIS
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN CIAMIS
9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA SETDA KABUPATEN CIAMIS
10. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN CIAMIS
11. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN CIAMIS
12. KEPALA BAGIAN PROKOPIM SETDA KABUPATEN CIAMIS

E. KOMISI A

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A DPRD KAB. CIAMIS.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. YOYO WAHYONO | KETUA KOMISI A |
| 2. AI RATNA INTAN SOLIHAN, M. SOS | WAKIL KETUA KOMISI A |
| 3. AGUS ROHIMAT | SEKRETARIS KOMISI A |
| 4. H. OIH BURHANUDIN | ANGGOTA KOMISI A |
| 5. H. OMAN, S.PD.I | ANGGOTA KOMISI A |
| 6. H. RAMLI MAHMUD, SE | ANGGOTA KOMISI A |
| 7. HJ. HAKIMAH, S.P | ANGGOTA KOMISI A |
| 8. H. ABU BAKAR SIDIK | ANGGOTA KOMISI A |
| 9. NOPI ZAENUDIN, S.PD.I | ANGGOTA KOMISI A |
| 10. MOHAMAD IJUDIN. M.PD | ANGGOTA KOMISI A |
| 11. NURDIN SOLEH, S.PD.I | ANGGOTA KOMISI A |
| 12. H. ENDANG KUSNANDANG, S.PD | ANGGOTA KOMISI A |

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PEMERINTAH DAERAH TELAH CUKUP MENJELASKAN KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN REALISASI PELAKSANAAN DARI PROGRAM DAN KEGIATAN SELAMA TAHUN 2024. NAMUN DEMIKIAN KOMISI A MELIHAT TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG MASIH PERLU DI DISKUSIKAN LEBIH LANJUT. PADA GILIRANNYA NANTI KAMI SAMPAIKAN DALAM BENTUK REKOMENDASI.

II. KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN KESIMPULAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SISTEMATIKA DAN FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

2. DALAM HAL KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN, SEBAGIAN BESAR REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG DITETAPKAN DENGAN HASIL CAPAIAN KINERJA BERVARIATIF.
3. DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENEMUKAN KESULITAN ATAU PERMASALAHAN, PADA UMUMNYA DAPAT DIATASI DENGAN BAIK.

III. REKOMENDASI

REKOMENDASI YANG KAMI SAMPAIKAN MELALUI YTH KETUA DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG MERUPAKAN CATATAN – CATATAN YANG BERISIKAN SARAN ATAU MASUKAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024 ANTARA LAIN SEBAGI BERIKUT :

1. INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS

LEBIH DITINGKATKANNYA PENGAWASAN MASALAH KEUANGAN DESA DAN MENAMBAH PPPK ATAU ASN SUPAYA DITEMPATKAN DI INSPEKTORAT KARENA BEBAN KERJA AKAN BERTAMBAH DENGAN ADANYA KOPERASI MERAH PUTIH.

2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS.

- KEBUTUHAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR DISDUKCAPIL UNTUK MENGOPTIMALKAN PELAYANAN YANG PRIMA .
- KEBUTUHAN KOMPUTER/PC SEBANYAK 25 UNIT YANG MEMERLUKAN KAPASITAS DAN KECEPATAN DALAM MENGOPERASIKAN SUATU PERANGKAT TEKNOLOGI BERUPA KOMPUTER/PC YANG MEMADAI UNTUK PELAYANAN ADMINDUK
- KEBUTUHAN ALAT CETAK ADMINDUK DIANTARANYA RIBBON KTP-EL DAN KIA, CLEANING KIT KTP-EL DAN KIA, RETRANSFER FILM KTP-EL, PRINTER EPSON (CETAK DOKUMEN ADMINDUK), SCANNER BIOMETRIK E-MOBILE, PRINTER KIA DAN BLANGKO KIA.
- LEBIH MENINGKATKAN PELAYANAN YANG PRIMA BAGI MASYARAKAT YANG DATANG KE DISDUKCAPIL.
- SELALU KOMUNIKATIF DENGAN OPERATOR-OPERATOR YANG ADA DI KECAMATAN UNTUK MEMINIMALISIR KENDALA-KENDALA YANG TERJADI

3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN CIAMIS

SINERGITAS ANTARA KEPALA DESA, APARAT DESA DAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA DI DESA DENGAN MELAKSANAKAN RAPAT-RAPAT YANG BERSIFAT ZOOM MEETNG

4. BADAN KESBANGPOL KABUPATEN CIAMIS

TUGAS VERIFIKASI KESBANGPOL TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT YANG BELUM TERDAFTAR DI KESBANGPOL .

5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. CIAMIS

AGAR SEGERA DILAKSANAKANYA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL DI TIAP-TIAP SKPD ATAUPUN DI KECAMATAN.

6. SATPOL PP KABUPATEN CIAMIS

- AGAR LEBIH MENINGKATKAN PENEGAKAN PERDA BAIK YANG ADA DI SEKITAR PERKOTAAN ATAUPUN YANG ADA DI KECAMATAN YANG BERADA DI KABUPATEN CIAMIS.
- MENAMBAH ANGGOTA SATPOL PP BAIK PPNS ATAUPUN PPPK.

7. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN CIAMIS

MENDORONG SEMUA STAKEHOLDERS AGAR MENSUPPORT LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA TERAKREDITASI.

8. ORGANISASI

REGROUPING DINAS AGAR LEBIH RAMPING DAN KEBUTAUHAN PEGAWAI BERKURANG SEHINGGA LEBIH EFEKTIF SECARA FUNGSI DAN EFISIEN SECARA BELANJA PEGAWAI.

9. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIAMIS

- USULAN REAHABILITASI MUSHOLA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIAMIS
- USULAN PEMBUATAN KANOPI UNTUK PARKIR KENDARAAN RODA 2
- USULAN PEMBUATAN TEMPAT WUDHU YANG KHUSUS.

BERKAITAN DENGAN BERBAGAI HAL TERSEBUT DI ATAS, MAKA DENGAN INI KOMISI A MENYAMPAIKAN PERMOHONAN REKOMNENDASI TERHADAP

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DAPAT
DISETUIJUI DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS INI.

IV. PENUTUP

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,


DEMIKIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI A DPRD KABUPATEN
CIAMIS TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI KAMI SAMPAIKAN.
JAZAKUMULLAHU AKHSANAL JAZA KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEMUA PIHAK
ATAS SEGALA PERHATIANNYA. MUDAH-MUDAHAN MEMBERIKAN MANFAAT
UNTUK SEMUA. AMIEN YA RABBAL 'ALAMIEN.

WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIEQ
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

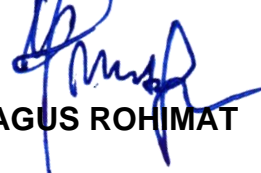
CIAMIS, 28 APRIL 2025

KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

KETUA,


YOYO WAHYONO

SEKRETARIS,


AGUS ROHIMAT

LAPORAN

**KOMISI B
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
DPRD KABUPATEN CIAMIS**

YANG BERTUNGAS MEMBAHAS

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

LAPORAN KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. SDR. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD

MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE KHADIRAT ALLOH SWT DAN MEMOHON PERTOLONGAN KEHADIRAT ILLAHI RABBI, YANG SENANTIASA MEMBERIKAN RAHMAT DAN TAUFIQ NYA, SEHINGGA ATAS IZIN DAN PERTOLONGAN-NYA KITA DIBERI KESEMPATAN UNTUK SAMA-SAMA HADIR DI TENGAH-TENGAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD SEBAGAI RANGKAIAN DARI KEGIATAN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA JUNGJUNGAN KITA YAKNI RASULULLAH MUHAMMAD SAW, KELUARGANYA, SAHABATNYA DAN TABI'AT TABI'IN DAN KITA SEMUA SELAKU UMATNYA YANG SENANTIASA BERHARAP MENDAPATKAN SAFA'ATNYA.

HADIRIN SIDANG RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

DALAM PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI, KOMISI B DPRD DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN SELURUH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KOMISI B MENYAMPAIKAN LAPORAN PEMBAHASAN INI DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PEMBAHASAN
- II. KESIMPULAN
- III. REKOMENDASI
- IV. PENUTUP

I. PEMBAHASAN

DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM MEMBAHAS LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024, MENGACU PADA DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, KHUSUSNYA RPJMD, RKPD, KUA DAN PPAS, PERDA TENTANG APBD TA. 2024 TERUTAMA UNTUK MELIHAT APAKAH MISI YANG DILAKSANAKAN OLEH BUPATI CIAMIS DALAM RANGKA MENCAPAI VISI, TELAH MENUNJUKAN PENCAPAIAN KINERJA SEBAGAIMAN TELAH DITETAPKAN DALAM PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024. SEDANGKAN RKPD DIPERGUNAKAN UNTUK MELIHAT APAKAH PROGRAM-PROGRAM YANG TERTUANG DI DALAMNYA TELAH DILAKSANAKAN SESUAI TARGET DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN. SEMENTARA KUA DAN PPAS SERTA APBD TA. 2024 DIPERGUNAKAN UNTUK MELIHAT APAKAH KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PPAS YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, TELAH DIJALANKAN SESUAI DENGAN NOTA KESEPAKATAN.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA PROGRAM ATAU KEGIATAN DAN KEUANGAN DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DENGAN REALISASINYA, SEDANGKAN TERHADAP KINERJA KEBIJAKAN DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBANDINGKAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DENGAN KEBIJAKAN YANG DILAKSANAKAN.

A. DASAR HUKUM PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

DASAR HUKUM PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DUA KALI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. KEPUTUSAN DPRD CIAMIS NOMOR 188.4/Kep.2/DPRD/2025 TENTANG PENUNJUKAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024.

B. MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI DILAKUKAN DENGAN, DENGAN TAHAPAN – TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYUSUNAN JADUAL PEMBAHASAN KOMISI B
2. STUDI DOKUMENTER, YAKNI MENELA'AH DAN MENGAJI SECARA CERMAT DAN SEKSAMA DOKUMEN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024, DOKUMEN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2024, RKPD TAHUN 2024, APBD TAHUN 2024 DAN DOKUMEN LAINNYA.

3. RAPAT KERJA DENGAN MITRA KERJA KOMISI B
4. PENYUSUNAN LAPORAN PEMBAHASAN.
5. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN.

C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT KERJA :

1. HARI : RABU DAN KAMIS
2. TANGGAL : 9 DAN 10 APRIL 2025
3. PUKUL : 09.00 WIB DAN 13.00 WIB
4. ACARA : PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024
5. TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS

D. SKPD MITRA YANG DI UNDANG :

1. BPKD KABUPATEN CIAMIS.
2. BAPENDA KABUPATEN CIAMIS
3. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS
5. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS.
6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN CIAMIS
7. KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KAB. CIAMIS
8. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN CIAMIS
9. DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALUH CIAMIS
10. DIREKTUR PERUMDA BPR GALUH CIAMIS
11. DIREKTUR PT. LKM CIAMIS
12. DIREKTUR PERUMDA GALUH PERDANA CIAMIS
13. DIREKTUR BANK JABAR CABANG CIAMIS

E. KOMISI B

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI B DPRD KAB. CIAMIS.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. H. AWAN SETIAWAN, SP | KETUA KOMISI B |
| 2. ERIK KRIDASETIA, ST | WAKIL KETUA KOMISI B |
| 3. Dr. TOTO MARWOTO,M.Pd | SEKRETARIS KOMISI B |
| 4. ERWIN RAHAYU DIKUSUMAH | ANGGOTA KOMISI B |
| 5. Ir. CECEP PERMANADI | ANGGOTA KOMISI B |
| 6. H. SARKUM | ANGGOTA KOMISI B |
| 7. IYAN SOFYAN, SKM.,MH | ANGGOTA KOMISI B |

8. H. DODI EFFENDI, ST	ANGGOTA KOMISI B
9. IMAM DANA KURNIA, S.Pt	ANGGOTA KOMISI B
10. H. UUS JAYUSMAN, S.Sos	ANGGOTA KOMISI B
11. H. ASEP KURNIAWAN, SE	ANGGOTA KOMISI B

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PEMERINTAH DAERAH TELAH MENJELASKAN KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN REALISASI PELAKSANAAN DARI PROGRAM DAN KEGIATAN SELAMA TAHUN 2024. PADA KAMI SAMPAIKAN DALAM BENTUK REKOMENDASI.

II. KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN KESIMPULAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SISTEMATIKA DAN FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
2. DALAM HAL KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN, SEBAGIAN BESAR REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG DITETAPKAN DENGAN HASIL CAPAIAN KINERJA BERVARIATIF.
3. DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MENEMUKAN KESULITAN ATAU PERMASALAHAN, PADA UMUMNYA DAPAT DIATASI DENGAN BAIK.

III. REKOMENDASI

REKOMENDASI YANG KAMI SAMPAIKAN MELALUI YTH KETUA DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH BERUPA SARAN ATAU MASUKAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024 ANTARA LAIN SEBAGI BERIKUT :

1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

TERKAIT PERTANIAN, KOMISI B DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ;

- BALAI BENIH PADI DI BANJARSARI BELUM BERJALAN DAN PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA) BELUM EFEKTIF KAMI REKOMENDASIKAN PERLU ADA ANGGARAN UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI BALAI BENIH PADI DI BANJARSARI DAN STA DI PANUMBANGAN

YANG SEKARANG INI KURANG BERFUNGSI.

- BALAI BENIH PADI DAN STA BISA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN BUMD GALUH PERDANA DALAM PENGELOLAAN HASIL PERTANIAN BAIK ITU HASIL PADI MAUPUN SAYURAN/HORTIKULTUR.
- PROGRAM PEMBANGUNAN IRIGASI DALAM HASIL PELAKSANAANNYA KURANG BERMANFAAT KARENA SEBAGIAN IRIGASI DALAM TIDAK KONSISTEN AIRNYA DAN TIDAK DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL OLEH PETANI PENERIMA BANTUAN IRIGASI TERSEBUT. DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI UNTUK PEMBUATAN IRIGASI DALAM, TEAM VERIFIKASI HARUS LEBIH SELEKTIF LAGI, KARENA ADA BEBERAPA IRDAL YANG TIDAK KELUAR AIRNYA DAN KURANG DIMANFAATKAN OLEH PETANI.
- KARENA ADA BEBERAPA IRDAL YANG TIDAK KELUAR AIRNYA DAN KURANG DIMANFAATKAN OLEH PETANI, SEYOGYANYA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI UNTUK PEMBUATAN IRIGASI DALAM, TEAM VERIFIKASI DAN KAJIAN KOSULTAN HARUS LEBIH SELEKTIF LAGI.

2. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- STATUS BANGUNAN PASAR TERNAK BANJARSARI BERMASALAH DAN MENJADI SENGKETA ANTARA PEMERINTAH DESA CIBADAK DENGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS YANG MENIMBULKAN TIDAK MASUKNYA PAD SEJAK TAHUN 2023, KAMI REKOMENDASIKAN SEGERA SESELESIKAN MASALAH SENGKETA STATUS TANAH PASAR TERNAK BANJARSARI ANTARA PEMERINTAH DESA CIBADAK, DINAS PETERNAKAN, BPKD DAN BAPENDA.
- UNTUK MENINGKATKAN PAD KABUPATEN CIAMIS AGAR PENGELOLAAN PASAR IKAN DAN TERNAK LEBIH DIOPTIMALKAN LAGI.
- AGAR MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS DAPAT MERASAKAN HASIL PEMBANGUNAN LEUWI KERIS DARI BIDANG PERIKANAN, KAMI REKOMENDASIKAN AGAR PERKEMBANGAN JARING APUNG DI LOKASI TERSEBUT DAPAT DIINVENTARISIR KEBERADAANNYA SEHINGGA BISA MENDATANGKAN HASIL BAGI PAD.

3. DINAS PARIWISATA

- MASIH ADANYA OBJEK WISATA SECARA BERTAHAP TERUS DILENGKAPI FASILITAS YANG MEMADAI, KAMI REKOMENDASIKAN OBJEK WISATA YANG SUDAH ADA DILENGKAPI FASILITASNYA YANG MEMADAI SEHINGGA AKAN MENINGKATKAN DAYA TARIK BAGI PENGUNJUNG.

- PENATAAN OBJEK WISATA/REST AREA KARANGKAMULYAN DAN UNTUK PENATAAN LOKASI PEDAGANG DI OBJEK WISATA SITUS KARANGKAMULYAN KELIHATAN RAPIH TAPI PENGUNJUNG MASIH MENGELUHKAN PANAS, SEHINGGA PERLU ADA UPAYA LANJUTAN PROGRAM PERINDANGAN DAN JADIKAN WISATA BERBASIS BUDAYA.
- PEMBANGUNAN LEUWI KERIS BELUM MAMPU MENINGKATKAN PAD UNTUK KABUPATEN CIAMIS, KARENA LEUWI KERIS MERUPAKAN ASET YANG BISA MENDATANGKAN PAD, UNTUK ITU AGAR ADA PENGELOLAAN KERJASAMA DINAS PARIWISATA DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT.
- KOLAM RENANG TIRTA WINAYA MASIH TERLIHAT KUMUH KAMI REKOMENDASIKAN HARUS ADA LANGKAH KONGKRIT UNTUK MENATA KEMBALI AGAR MAMPU MENARIK PENGUNJUNG DAN MENINGKATKAN PAD.
- PASCA PEMBANGUNAN/PENATAAN OBJEK WISATA SITU PANJALU MENINGGALKAN PERMASALAH YANG CUKUP PELIK, KAMI REKOMENDASIKAN SEGERA BANTU PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI OBJEK WISATA SITU PANJALU DENGAN MELIBATKAN INSTITUSI PEMANGKU KEPENTINGAN.

4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- SEHUBUNGAN BANYAK PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG SUDAH SELESAI PEMBANGUNANNYA TETAPI MASIH ADA TUNGGAKAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KE 3 (TIGA) KAMI REKOMENDASIKAN SEGERA LAKUKAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN TERSEBUT AGAR IKLIM USAHA DIBIDANG INFRASTRUKTUR DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN TIDAK BERTINDAK MELAWAN HUKUM.
- BEBERAPA SKPD MASIH MASIH ADA YANG CAPAIAN ANGGARAN DI BAWAH 100 % KARENA MASIH TERDAPAT PENUNDAAN ANGGARAN DARI BEBERAPA KEGIATAN KAMI REKOMENDASIKAN PERLU ADA SKALA PRIORITAS ATAS DASAR AGAR LEBIH MEMENTINGKAN KEGIATAN YANG DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT.
- TAHUN ANGGARAN 2024 MASIH BANYAK PROGRAM KEGIATAN BERUPA BANTUAN KEUANGAN DAN HIBAH UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM YANG BELUM TERALISASI KAMI REKOMENDASIKAN AGAR SEGERA DIREALISASIKAN DI TAHUN 2025.

5. BADAN PENDAPATAN DAERAH

- MASIH ADANYA WAJIB PAJAK DI BIDANG RESTORAN/RUMAH MAKAN YANG MEMBANDEL, KAMI REKOMENDASIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN, PEMERINTAH DAERAH HARUS BERTINDAK TEGAS TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN YANG MEMBANDEL DENGAN CARA DIPASANG SEGEL/BANNER BAHWA RUMAH KAMI REKOMENDASIKANN/RESTORAN INI TIDAK BAYAR PAJAK, HAL INI DILAKUKAN UNTUK MENIBULKAN EFEK JERA BAGI PENGUSAHA/PEMILIK USAHA RESTORAN/RUMAH KAMI REKOMENDASIKANN TERSEBUT.
- PENGELOLAAN PARKIR BELUM DI TATA DENGAN BAIK, KAMI REKOMENDASIKANN HARUS DILAKUKAN PENATAAN ULANG PARKIR-PARKIR DI TEPI JALAN DAN MAKSIMALKAN SYSTEM PARKIR BERLANGGANAN.
- BANYAK MASYARAKAT YANG MENGELUHKAN MAHALNYA TARIF PARKIR BAGI PENUNGGU PASIEN DI RSUD CIAMIS KAMI REKOMENDASIKAN LAKUKAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PENGENAAN TARIF PROGRESIF TERSEBUT.
- ADA ASSET YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH DAERAH/APBD DIJADIKAN OBJEK KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA KAMI REKOMDASIKAN AGAR MELAKUKAN MELAKUKAN EVALUASI MOU KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR DI RSUD CIAMIS.
- LALUKAN INOVASI DALAM PENCAPAIAN PAD DENGAN CARA MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KE 3 (TIGA) TERKAIT REKAM JEJAK/KUNJUNGAN TAMU DI RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN BUAT KOTAK BAYAR LANGSUNG PAJAK 10 (SEPULUH) PERSEN DI RUMAH KAMI REKOMENDASIKANN/RESTORAN TERSEBUT.

6. DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN PELAYANAN SATU PINTU

PARA PENGUSAHA MASIH BANYAK YANG ENGGAN UNTUK BERINVESTASI DI KABUPATEN CIAMIS KAMI REKOMENDASIKAN PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMPUNYAI INVOASI DAN JAMINAN BAGI INVESTOR AGAR MERASA AMAN DAN NYAMAN DALAHM HAK BERINVESTASI DI CIAMIS, SEHINGGA MAMPU MENDATANGKAN/MENARIK INVESTOR KE KABUPATEN CIAMIS, DAN AGAR MEMPERMUDAH DALAM PROSES PERMOHONAN PERIJINANNNYA TERUTAMA DALAM BIDANG USAHA PENGELOLAAN PARIWISATA.

7. DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

- SEJAK PERUBAHAN NAMA DINAS KUKMP (KOPERASI, UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN) BIDANG PERINDUSTRIAN BELUM MASUK DALAM NOMENKELATUR, SEHINGGA PERLU ADA PERUBAHAN NOMENKELATUR DARI KUKMP MENJADI KUKMPP, AGAR KUCURAN ANGGARAN DARI PUSAT UNTUK PROGRAM/KEGIATAN PERINDUSTRIAN TIDAK TERSENDAT.
- DENGAN BANYAKNYA PEDAGANG KAKI LIMA DI LOKASI PARKIR PASAR MANIS CIAMIS KAMI REKOMENDASIKAN SEGERA LAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LOKASI TERSEBUT.

8. BUMD

- SETELAH ADA KENAIKAN TARIF PEMBAYARAN PDAM TIRTA GALUH CIAMIS KERUGIAN TAHUN SEBELUMNYA TELAH TERTUTUP BAHKAN SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2025 TELAH MENCATAT KEUNTUNGAN HAMPIR 1 (SATU) MILYAR KAMI REKOMENDASIKAN CARI REGULASI YANG MEMUNGKINKAN PENDAPATAN DARI PERUMDAM TITRA GALUH CIAMIS UNTUK DAPAT MENYETORKAN DEVIDEN KE KAS DAERAH SEBAGAI PAD.
- SALAH SATU BUMD (PT. BPR ATHA GALUH MANDIRI) TELAH DI MERGER DENGAN BUMD KABUPATEN LAIN DAN HANYA MENJADI CABANG, SELAIN ITU PENDAPATAN UNTUK KABUPATEN CIAMIS SULIT TERUKUR PADALAH SAHAM KITA CUKUP BESAR RP 3,5 MILYAR, KAMI REKOMENDASIKAN AGAR SAHAM KITA LEBIH BAIK UNTUK DI JUAL DAN DI JADIKAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BUMD YANG SECARA OPERASIOONAL MENGUNTUNGGKAN.
- BUMD PERLU TERUS DILAKUKAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN AGAR BERJALAN SESUAI HARAPAN YANG SEKARANG MASIH KELIHATAN TERSENDAT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA.
- TERKAIT KELANJUTAN PERJALANAN KEGIATAN USAHA PT. LKM YANG CENDERUNG MERUGI KAMI REKOMENDASIKAN AGAR OPERASIONAL PT. LKM UNTUK DI KAJI ULANG.
- BANK GALUH HARUS MENGAMBIL PERAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN ATAU BEREDARNYA BANK EMBOK DI MASYARAKAT, PENINGKATAN TARGET PENDAPATAN DAN MENJADI KOMPETITOR YANG TANGGUH BAGI BANK-BANK SWASTA

IV. PENUTUP

HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

KOMISI B DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI SECARA SISTEMATIS DAN LENGKAP, KAMI BERUSAHA AGAR REKOMENDASI INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN YANG CUKUP MEMADAI UNTUK MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025.

LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENGHASILKAN REKOMENDASI YANG DAPAT DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS.

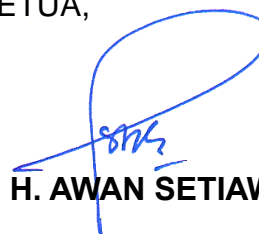
DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA SEMUA PIHAK TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA. MUDAH-MUDAHAN MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS. AMIEN YA RABBAL 'ALAMIEN.

WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQWAMITH THARIEQ

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB

CIAMIS, 28 APRIL 2025

KOMISI B DPRD KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



H. AWAN SETIAWAN, SP

LAPORAN

KOMISI C
BIDANG PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN CIAMIS

YANG BERTUNGAS MEMBAHAS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

LAPORAN KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS
YANG BERTUGAS MEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024

LAPORAN PEMBAHASAN KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS TAHUN 2024, DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. REKOMENDASI
- V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ) BUPATI CIAMIS DISUSUN SEBAGAI AMANAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAAN LKPJ SECARA LEBIH JELAS DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

LKPJ INI MERUPAKAN DESKRIPSI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS SELAMA TAHUN 2024 YANG KOMPREHENSIF, TERINTEGRASI DAN INFORMATIF, DI DALAMNYA DISAJIKAN ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDIRI ATAS HASIL KINERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH.

PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI MEMILIKI MAKNA PENTING, KARENA DI DALAMNYA MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD MITRA KOMISI D, BERUPA CAPAIAN KINERJA DARI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA.

II. PEMBAHASAN

A. MITRA KOMISI C

MITRA KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS, YAITU :

1. DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS ;
2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN CIAMIS ;
3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS ;
4. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS ;
5. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ;

B. MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS, MELAKSANAKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI DENGAN MEKANISME DAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYUSUN JADWAL KEGIATAN KOMISI C DAN MENYUSUN DAFTAR INVENTARIS MASALAH;
2. MEMPELAJARI DAN MENGKAJI DOKUMEN SECARA CERMAT ANTARA LAIN :
 - a. DOKUMEN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024;
 - b. DOKUMEN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024;
 - c. RKPD TAHUN 2024;
 - d. APBD TAHUN 2024 DAN DOKUMEN LAINNYA;
3. MELAKSANAKAN RAPAT KERJA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) MITRA KOMISI C;
4. MELAKSANAKAN UJI PETIK LAPANGAN DAN KUNJUNGAN KERJA UNTUK MENDAPATKAN BEBERAPA HAL YANG SANGAT BERGUNA DALAM PENGAMBILAN KESIMPULAN DAN ANALISIS GUNA MENYAMPAIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH.
5. MELAKSANAKAN *STUDY* BANDING KE DPRD KABUPATEN CILACAP DAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN.
6. PENDALAMAN MATERI YANG DIANGGAP PERLU DENGAN BEBERAPA OPD.
7. MENYUSUN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN.
8. HARMONISASI DENGAN SELURUH PIMPINAN FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS.
9. MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PADA RAPAT PARIPURNA INTERNAL.

C. ANALISIS TERHADAP LKPJ

1. ANALISIS TERHADAP FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SECARA RINCI DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR

18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

RUANG LINGKUP LKPJ SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 15 DAN 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA.

RUANG LINGKUP LKPJ SESUAI PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 JUGA MEMUAT CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT, DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.

LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI SECARA LEGAL FORMAL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

2. ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

ANALISIS INI DILAKUKAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA, DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI SKPD MITRA KERJA KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

**1. DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS ;**

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.089.300.619	15.416.340.571
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.619.509.000	40.926.889.553
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.699.864.010	16.344.150.960
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.711.642.000	12.663.067.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN	300.000.000	28.195.000
6	DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENATAAN SISTEM DRAINASE BANGUNAN GEDUNG	335.000.000	335.000.000
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.103.974.274	2.965.584.274
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	122.722.994.750	109.334.167.305
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KOSNTRUKSI	250.000.000	249.658.000
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.222.300.000	1.005.575.000

11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	77.400.000	29.540.000
12	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.382.810.000	1.816.846.000
13	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000	48.810.000

ANGGARAN DAN REALISASI PER PROGRAM DPUPRP TAHUN 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
	13 PROGRAM 20 KEGIATAN 43 SUB KEGIATAN	221.614.794.653	201.163.823.663
PROSENTASE		90,771%	

REKAPITULASI ANGGARAN TAHUN 2024

DINAS PUPRP KAB. CIAMIS

DAU / APBD	RP. 90.293.538.653
APBN / DAK	RP. 56.499.153.000
BKK PROVINSI	RP. 74.822.103.000
TOTAL	RP. 221.614.794.653

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPUPRP TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS	1 PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN	90,10 %	90,12 %	100,02 %

	BAGI MASYARAKAT	2	PROSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK	61,25 %	61,25 %	100 %
		3	PERSENTASE GEDUNG PEMERINTAH DALAM KONDISI BAIK	85,80 %	85,80 %	100 %
		4	PROSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM	92,28 %	92,29%	100,01 %
		5	PROSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES SANITASI	74,97%	75,03 %	100,08 %
		6	PROSENTASE PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN	100 %	100 %	100 %
2	MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	1	LEVEL MATURITAS SPIP	3	3	100 %
		2	HASIL EVALUASI SAKIP	BB	BB	100 %
		3	KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN	801	800,18	99,90 %
		4	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	95,91	95,91	100 %

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2024**

**REALISASI PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIDANG
BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN :**

1. PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SEPANJANG 42,14 KM
2. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN DI 7 UPTD WILAYAH DENGAN PANJANG JALAN YANG DIPELIHARA SEPANJANG 202,30 KM
3. PEMBANGUNAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN SEBANYAK 3 UNIT
4. ANGGARAN TOTAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN TAHUN 2024 ADALAH SEBESAR RP. 122.722.994.750 DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 109.334.167.305

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2024**

- a. REALISASI PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIDANG PSDA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN:
 1. PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI SEBANYAK 5 DAERAH IRIGASI (DI) SEPANJANG 4.851,00 METER
 2. REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SEBANYAK 60 DAERAH IRIGASI (DI) SEPANJANG 8.793,00 METER
 3. OPERASI DAN PEMELIHARAAN (OP) JARINGAN IRIGASI DI 13 DAERAH IRIGASI TEKNIS DENGAN PANJANG PENANGANAN 9.600,00 METER
 4. TOTAL ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENANGANAN INFRASTRUKTUR IRIGASI DAN SUNGAI TAHUN 2024 ADALAH SEBESAR RP. 44.619.509.000 DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 40.926.889.553

- b. REALISASI PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN :

1. REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH SEBANYAK 3 PAKET
 2. JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPAT BANTUAN PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM/AIR BERSIH SEBANYAK 1.946 KK
 3. JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPAT BANTUAN PENYEDIAAN SANITASI LAYAK SEBANYAK 1.293 KK
 4. TOTAL ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENANGANAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN TAHUN 2024 ADALAH SEBESAR RP. 34.400.480.284 DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 32.585.655.234
- c. REALISASI PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIDANG TATA RUANG & PERTANAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN :
1. PENYUSUNAN RDTR SEBANYAK 1 KECAMATAN (KEC. PANAWANGAN)
 2. PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN SEBANYAK 2 KAJIAN
 3. KAJIAN PEMANFAATAN LAHAN DAN KEBUTUHAN LAHAN SEBANYAK 13 KAJIAN
 4. PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JEMBATAN CITANDUY DI DESA SIDARAHAYU KECAMATAN PURWADADI
 5. TOTAL ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BIDANG TATA RUANG & PERTANAHAN TAHUN 2024 ADALAH SEBESAR RP. 3.782.510.000 DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 2.900.771.000

KESIMPULAN :

SECARA KESELURUHAN PROGRES REALISASI KEGIATAN-KEGIATAN FISIK DI TAHUN 2024 TELAH SELESAI 100%, REALISASI ANGGARAN SEBESAR 90,771% DENGAN EFISIENSI ANGGARAN SEBESAR RP. 4.290.950.390, SEDANGKAN SISA ANGGARAN YANG BELUM DIBAYARKAN DIKARENAKAN KARENA PENCAIRAN ANGGARANNYA YANG BELUM SELESAI PADA TAHUN 2024 ADALAH SEBESAR RP. 16.160.020.600, NAMUN TELAH DIANGGARAKAN KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN 2025

2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN CIAMIS ;

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD, APBD PROPINSI DAN APBN TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
URUSAN WAJIB				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				161.315.000
1 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA				161.315.000
1 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	APBD	3 UNIT	KEC. PANAWANGAN	161.315.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				435.749.000
1 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA				169.730.000
1 SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH				169.730.000
- <i>UPDATING INVENTARISASI DATA RUMAH (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)</i>	<i>APBD</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KAB. CIAMIS</i>	<i>169.730.000</i>
2 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA				266.019.000
1 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUGARAN/ PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH				266.019.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
- DED KAWASAN KUMUH CIBODAS DESA CISADAP KEC. CIAMIS	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	100.000.000
- REVIEW DED KAWASAN KUMUH KARENGCENGEK DS. PAMARICAN KEC. PAMARICAN	APBD	1 PAKET	KEC. PAMARICAN	100.000.000
- KONSULTAN INDIVIDU PENDAMPINGAN PENATAAN KAWASAN KUMUH KAB. CIAMIS	APBD	1 PAKET	KAB. CIAMIS	32.400.000
- BIAYA UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUGARAN/ PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	APBD			33.619.000
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH				1.646.907.000
1 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.646.907.000
1 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA				1.072.666.000
- BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU	APBD	42 UNIT	KAB. CIAMIS	850.000.000
- BIAYA UMUM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	APBD			222.666.000
2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP KUMUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU				574.241.000
- PERENCANAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KAB. CIAMIS	44.882.000
- KONSULTAN INDIVIDU PENDAMPINGAN PENATAAN KAWASAN KUMUH KAB. CIAMIS (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KAB. CIAMIS	42.958.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
- PEMBUATAN PEMETAAN KAWASAN KUMUH PRIORITAS KECAMATAN CIAMIS (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	244.838.000
- PEMBUATAN PEMETAAN KAWASAN KUMUH PRIORITAS KECAMATAN KAWALI (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KEC. KAWALI	241.563.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				14.764.910.000
1 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN				14.764.910.000
1 PENYEDIAAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN				14.764.910.000
- PERENCANAAN PENATAAN TAMAN DAN GAPURA PERUM PERMATA GALUH I	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	5.500.000
- PENGAWASAN PENATAAN TAMAN DAN GAPURA PERUM PERMATA GALUH I	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	3.500.000
- PENATAAN TAMAN DAN GAPURA PERUM PERMATA GALUH I	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	111.000.000
- REKONSTRUKSI JALAN AKSES WISATA MARALAYA (MEKARSARI) (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. TAMBAKSARI	2.500.000.000
- REKONSTRUKSI JALAN CIKUPA-PUTRA RAJA (WISATA SITUS PURBA RAJA) (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. PAMARICAN	2.500.000.000
- REKONSTRUKSI JALAN SUKAHURIP (WISATA CURUG SALOSIN) (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. CIHAURBEUTI	3.500.000.000
- PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN AKSES WISATA MARALAYA (MEKARSARI)	APBD	1 PAKET	KEC. TAMBAKSARI	95.000.000
- PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN CIKUPA-PUTRA RAJA (WISATA SITUS PURBA RAJA)	APBD	1 PAKET	KEC. PAMARICAN	80.000.000
- PERENCANAAN REKONSTRUKSI JALAN SUKAHURIP (WISATA CURUG SALOSIN)	APBD	1 PAKET	KEC. CIHAURBEUTI	80.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
- PENGAWASAN REKONSTRUKSI JALAN AKSES WISATA MARALAYA (MEKARSARI)	APBD	1 PAKET	KEC. TAMBAKSARI	75.000.000
- PENGAWASAN REKONSTRUKSI JALAN CIKUPA-PUTRA RAJA (WISATA SITUS PURBA RAJA)	APBD	1 PAKET	KEC. PAMARICAN	90.000.000
- PENGAWASAN REKONSTRUKSI JALAN SUKAHURIP (WISATA CURUG SALOSIN)	APBD	1 PAKET	KEC. CIHAURBEUTI	100.000.000
- PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN CIGEMBOR (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. CIGEMBOR	1.820.000.000
- PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN CIGEMBOR (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. CIGEMBOR	100.000.000
- PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN CIGEMBOR (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. CIGEMBOR	80.000.000
- PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN KERTASARI KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. KERTASARI	1.390.000.000
- PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN KERTASARI KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. KERTASARI	60.000.000
- PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN KERTASARI KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. KERTASARI	50.000.000
- PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN MALEBER KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. MALEBER	1.865.000.000
- PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN MALEBER KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. MALEBER	70.000.000
- PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN MALEBER KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEL. MALEBER	65.000.000
- PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN PSU LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KAB. CIAMIS	44.910.000
- BIAYA UMUM PENYEDIAAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	APBD			80.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				225.000.000
1 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA				225.000.000
1 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	APBD	2 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	225.000.000
- REVIEW DOKUMEN KLHS RPJMD KAB. CIAMIS				
- REVIEW DOKUMEN KLHS RPJPD KAB. CIAMIS				
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.800.000.000
1 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA				1.360.000.000
1 KOORDINASI , SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT	APBD	1 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	445.000.000
2 KOORDINASI ,SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	APBD	1 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	200.000.000
3 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA				715.000.000
- PEMBANGUNAN IPAL LABORATORIUM	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	150.000.000
- BIAYA UMUM PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	APBD			565.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
2 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA				440.000.000
1 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	APBD	1 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	440.000.000
- PENYUSUNAN DATABASE PENGHASIL LIMBAH B3 DI KAB. CIAMIS				
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				39.773.667.000
1 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA				39.773.667.000
1 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	APBD	42 TAMAN	KAB. CIAMIS	39.773.667.000
- REVIEW PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BERKALA PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA PUBLIK TEMPAT PARKIR DAN KULINER ALUN-ALUN CIAMIS	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	262.500.000
- PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA PUBLIK TEMPAT PARKIR DAN KULINER ALUN-ALUN CIAMIS	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	1.200.000.000
- PEMELIHARAAN TAMAN SURAWISESA (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KEC. KAWALI	129.888.000
- PAGAR ALUN-ALUN CIAMIS (SAFETY LINE) (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KEC. CIAMIS	198.033.000
- PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA PUBLIK TEMPAT PARKIR DAN KULINER ALUNALUN TIMUR CIAMIS DI KEC. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. CIAMIS	34.557.380.000
- PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI KECAMATAN SUKADANA KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. SUKADANA	2.341.500.000
- PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI KECAMATAN SUKADANA KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. SUKADANA	98.500.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
- REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI KECAMATAN SUKADANA KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. SUKADANA	60.000.000
- BIAYA UMUM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	APBD			925.866.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				25.000.000
1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.000.000
1 FASILITAS PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	APBD	50 BERKAS	KAB. CIAMIS	25.000.000
- PENERBITAN REKOMENDASI LINGKUNGAN				
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN MENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				109.910.000
1 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA				109.910.000
1 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	APBD	1 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	109.910.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				325.000.000
1 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA				325.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
1 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT / LEMBAGA MASYARAKAT/ DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN / FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD	1 ENTITAS	KAB. CIAMIS	325.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				75.000.000
1 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/ KOTA				75.000.000
1 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	APBD	1 LAPORAN	KAB. CIAMIS	75.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				15.862.746.000
1 PENGELOLAAN SAMPAH				15.862.746.000
1 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	APBD	30 KELOMPOK	KAB. CIAMIS	1.150.000.000
2 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA				3.982.677.000
- MOTOR RODA 3	APBD	2 UNIT	KAB. CIAMIS	80.000.000
- GEROBAK SAMPAH	APBD	14 UNIT	KAB. CIAMIS	105.000.000
- CONTAINER SAMPAH	APBD	6 UNIT	KEC. CISAGA	180.000.000
- MESIN RUMPUT	APBD	5 UNIT	KEC. CISAGA	20.000.000
- TPS KOMUNAL	APBD	27 UNIT	KAB. CIAMIS	135.000.000
- TROLI SAMPAH	APBD	51 BUAH	KAB. CIAMIS	33.700.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
- CHAINSAW MATIC	APBD	3 UNIT	KAB. CIAMIS	22.200.000
- PEMBANGUNAN RUMAH PEMBIBITAN	APBD	1 PAKET	KEC. CISAGA	100.000.000
- PENGADAAN GEROBAK SAMPAH DAN KOMUNAL (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KAB. CIAMIS	194.445.000
- PENATAAN IPLT BOJONGMENGGER (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KEC. CIJEUNGJING	198.055.000
- HANGGAR PEMILAHAN SAMPAH DI TPA (UTANG ANGGARAN TAHUN 2023)	APBD	1 PAKET	KEC. CISAGA	198.077.000
- PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA BUNTER KEC. SUKADANA KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. SUKADANA	525.000.000
- PENGAWASAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA BUNTER KEC. SUKADANA KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. SUKADANA	40.000.000
- REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA BUNTER KEC. SUKADANA KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. SUKADANA	35.000.000
- PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA KALAPASAWIT KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. LAKBOK	525.000.000
- PENGAWASAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA KALAPASAWIT KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. LAKBOK	40.000.000
- REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA KALAPASAWIT KEC. LAKBOK KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. LAKBOK	35.000.000
- PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA NAGARAPAGEUH KEC. PANAWANGAN KAB. CIAMIS (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. PANAWANGAN	525.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
- <i>PENGAWASAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA NAGARAPAGEUH KEC. PANAWANGAN KAB. CIAMIS (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. PANAWANGAN</i>	<i>40.000.000</i>
- <i>REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA NAGARAPAGEUH KEC. PANAWANGAN KAB. CIAMIS (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. PANAWANGAN</i>	<i>35.000.000</i>
- <i>PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA SUKAHURIP KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. CIHAURBEUTI</i>	<i>525.000.000</i>
- <i>PENGAWASAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA SUKAHURIP KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. CIHAURBEUTI</i>	<i>40.000.000</i>
- <i>REVIEW PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH REUSE, REDUCE, RECYCLE (TPS3R) DI DESA SUKAHURIP KEC. CIHAURBEUTI KAB. CIAMIS (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. CIHAURBEUTI</i>	<i>35.000.000</i>
- <i>BIAYA UMUM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA</i>	<i>APBD</i>			<i>316.200.000</i>
3 <i>PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA</i>	<i>APBD</i>	<i>112.292,88 TON</i>	<i>KAB. CIAMIS</i>	<i>10.730.069.000</i>
- <i>PAKAIAN LAPANGAN PERSAMPAHAN</i>	<i>APBD</i>	<i>340 STEL</i>	<i>KAB. CIAMIS</i>	<i>170.000.000</i>
- <i>PENGEMBANGAN BANK SAMPAH DAN SISTEM ZERO WASTE DI DESA HANDAPHERANG KEC. CIJEUNGJING (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. CIJEUNGJING</i>	<i>599.793.000</i>
- <i>PENGEMBANGAN BANK SAMPAH DAN SISTEM ZERO WASTE DI DESA KARYAMULYA KEC. CISAGA (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. CISAGA</i>	<i>599.793.000</i>
- <i>PENGEMBANGAN BANK SAMPAH DAN SISTEM ZERO WASTE DI DESA MEKARWANGI KEC. SUKAMANTRI (BKK JABAR)</i>	<i>APBD PROV</i>	<i>1 PAKET</i>	<i>KEC. SUKAMANTRI</i>	<i>599.793.000</i>

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER BIAYA	VOLUME	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5
PENGAWASAN PENGEMBANGAN BANK SAMPAH DAN SISTEM ZERO WASTE (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KAB. CIAMIS	71.800.000
PERENCANAAN PENGEMBANGAN BANK SAMPAH DAN SISTEM ZERO WASTE (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KAB. CIAMIS	71.755.000
MANTAN TERINDAH (MANFAATKAN GAS METAN TERINOVASI DARI SAMPAH) (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. CISAGA	930.000.000
PENGAWASAN MANTAN TERINDAH (MANFAATKAN GAS METAN TERINOVASI DARI SAMPAH) (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. CISAGA	40.000.000
PERENCANAAN MANTAN TERINDAH (MANFAATKAN GAS METAN TERINOVASI DARI SAMPAH) (BKK JABAR)	APBD PROV	1 PAKET	KEC. CISAGA	30.000.000
- BIAYA UMUM PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	APBD			7.617.135.000
JUMLAH A :				75.205.204.000

NON URUSAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.216.822.224
1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				30.650.000
1 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	APBD	2 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	7.800.000
2 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	APBD	2 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	5.400.000

3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	APBD	2 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	5.950.000
4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	APBD	2 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	5.400.000
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	APBD	1 LAPORAN	KAB. CIAMIS	6.100.000
2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					12.500.122.224
1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	APBD	140 ORG/BULAN	KAB. CIAMIS	12.489.822.224
2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	APBD	1 LAPORAN	KAB. CIAMIS	4.900.000
3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	APBD	12 LAPORAN	KAB. CIAMIS	5.400.000
3 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					570.000.000
1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	APBD	56 PAKET	KAB. CIAMIS	100.000.000
2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	APBD	7 PAKET	KAB. CIAMIS	25.000.000
3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	APBD	3 PAKET	KAB. CIAMIS	100.000.000
4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	APBD	12 DOKUMEN	KAB. CIAMIS	265.000.000
5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	APBD	12 LAPORAN	KAB. CIAMIS	80.000.000
4 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					39.550.000
1	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	APBD	1 UNIT	KAB. CIAMIS	39.550.000

5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				450.000.000
1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	APBD	1 LAPORAN	KAB. CIAMIS	450.000.000
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				626.500.000
1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	APBD	37 UNIT	KAB. CIAMIS	344.000.000
2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	APBD	4 UNIT	KAB. CIAMIS	86.000.000
3	PEMELIHARAAN/REHABILITAS GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	APBD	5 UNIT	KAB. CIAMIS	196.500.000
JUMLAH B :					14.216.822.224
JUMLAH A + B :					89.422.026.224

RINCIAN ANGGARAN

SUMBER DANA		ANGGARAN
APBD	GAJI	12.489.822.224
	BELANJA	18.821.980.000
EMARKED		1.709.910.000
PROVINSI		56.400.314.000
TOTAL ANGGARAN		89.422.026.224

3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS ;

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024		SISA ANGGARAN (RP)
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	11,559,609,137	10,889,337,587	94.20	670,271,550
5 1	PERENCANAAN	11,033,934,137	10,367,999,587	93.96	665,934,550
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,041,527,337	7,402,725,307	92.06	638,802,030
5 1 1 2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71,803,000	71,803,000	100.00	0
5 1 1 2.01 1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10,650,000	10,650,000	100.00	0
5 1 1 2.01 2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9,250,000	9,250,000	100.00	0
5 1 1 2.01 3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9,250,000	9,250,000	100.00	0
5 1 1 2.01 4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9,250,000	9,250,000	100.00	0
5 1 1 2.01 5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	9,250,000	9,250,000	100.00	0
5 1 1 2.01 6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16,326,000	16,326,000	100.00	0
5 1 1 2.01 7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7,827,000	7,827,000	100.00	0
5 1 1 2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6,354,487,337	5,921,152,510	93.18	433,334,827
5 1 1 2.02 1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6,341,287,337	5,907,952,510	93.17	433,334,827
5 1 1 2.02 5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5,500,000	5,500,000	100.00	0
5 1 1 2.02 7	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	7,700,000	7,700,000	100.00	0
5 1 1 2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	589,839,600	546,467,100	92.65	43,372,500
5 1 1 2.06 1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28,763,000	28,763,000	100.00	0
5 1 1 2.06 2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	106,480,500	106,480,500	100.00	0
5 1 1 2.06 3	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	42,390,000	42,390,000	100.00	0
5 1 1 2.06 4	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	21,042,500	21,042,500	100.00	0
5 1 1 2.06 5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49,960,100	49,953,100	99.99	7,000
5 1 1 2.06 6	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24,950,000	23,460,000	94.03	1,490,000
5 1 1 2.06 9	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	219,320,000	177,444,500	80.91	41,875,500
5 1 1 2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	96,933,500	96,933,500	100.00	0
5 1 1 2.07 11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	96,933,500	96,933,500	100.00	0
5 1 1 2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	633,500,400	548,603,797	86.60	84,896,603
5 1 1 2.08 1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8,000,000	8,000,000	100.00	0
5 1 1 2.08 2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	172,500,400	134,103,797	77.74	38,396,603

5	1	1	2.08	4	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	453,000,000	406,500,000	89.74	46,500,000
5	1	1	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	391,897,000	314,698,900	80.30	77,198,100

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024		SISA ANGGARAN (RP)
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
5	1 1 2.09 2	263,400,000	251,498,900	95.48	11,901,100
5	1 1 2.09 9	65,297,000	0	0.00	65,297,000
5	1 1 2.09 11	63,200,000	63,200,000	100.00	0
5	1 2	1,792,165,000	1,767,056,580	98.60	25,108,420
5	1 2 2.01	965,700,000	943,767,920	97.73	21,932,080
5	1 2 2.01 3	76,000,000	76,000,000	100.00	0
5	1 2 2.01 4	23,500,000	23,500,000	100.00	0
5	1 2 2.01 5	202,000,000	202,000,000	100.00	0
5	1 2 2.01 6	59,200,000	59,200,000	100.00	0
5	1 2 2.01 7	605,000,000	583,067,920	96.37	21,932,080
5	1 2 2.02	376,465,000	375,903,900	99.85	561,100
5	1 2 2.02 1	264,465,000	264,103,900	99.86	361,100
5	1 2 2.02 2	62,000,000	61,800,000	99.68	200,000
5	1 2 2.02 3	50,000,000	50,000,000	100.00	0
5	1 2 2.03	450,000,000	447,384,760	99.42	2,615,240
5	1 2 2.03 1	93,000,000	93,000,000	100.00	0
5	1 2 2.03 3	357,000,000	354,384,760	99.27	2,615,240
5	1 3	1,200,241,800	1,198,217,700	99.83	2,024,100
5	1 3 2.01	342,081,200	342,081,200	100.00	0
5	1 3 2.01 1	9,155,700	9,155,700	100.00	0

5	1	3	2.02	8	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	165,600,000	165,600,000	100.00	0
5	1	3	2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	414,551,800	413,651,800	99.78	900,000
5	1	3	2.03	1	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKP)	11,587,200	11,587,200	100.00	0
5	1	3	2.03	2	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	9,212,200	9,212,200	100.00	0
5	1	3	2.03	3	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	4,499,700	4,499,700	100.00	0
5	1	3	2.03	4	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	221,474,100	221,474,100	100.00	0
5	1	3	2.03	5	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKP)	14,360,900	14,360,900	100.00	0
5	1	3	2.03	6	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	16,340,400	16,340,400	100.00	0
5	1	3	2.03	7	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	14,615,400	14,615,400	100.00	0
5	1	3	2.03	8	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	122,461,900	121,561,900	99.27	900,000
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	525,675,000	521,338,000	99.17	4,337,000
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	525,675,000	521,338,000	99.17	4,337,000
5	5	2	2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	200,000,000	200,000,000	100.00	0

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024		SISA ANGGARAN (RP)				
			RP	%					
1	2	3	4	5	6				
5	5	2	2.01	12	PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	200,000,000	200,000,000	100.00	0
5	5	2	2.03		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	100,000,000	97,583,000	97.58	2,417,000
5	5	2	2.03	9	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM	100,000,000	97,583,000	97.58	2,417,000
5	5	2	2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	225,675,000	223,755,000	99.15	1,920,000
5	5	2	2.04	3	DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	205,675,000	205,675,000	100.00	0
5	5	2	2.04	5	FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	20,000,000	18,080,000	90.40	1,920,000

4. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS ;

CAPAIAN KINERJA :

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	PRESENTA SE
MISI 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA	INDEKS KESELAMATAN LALU LINTAS	96,736	97,892	101,19 %
MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DARAT YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK	PRESENTASE SARANA /PRASARANA LALU LINTAS YANG LAYAK FUNGSI	95,762	95,783	100,022 %
ANGKUTAN DARAT YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK	PRESENTASE LAYANAN ANGKUTAN DARAT YANG LAYAK FUNGSI	97,711	100,000	102,34 %

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN			
II.	MISI 5 :MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PERHUBUNGAN	85,50	90,22	105,52 %
2.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK TUJUAN PENETAPAN DAN PENGUKURAN, PENGUMPULAN DATA,PENGLASIFIKASIAN, PENGIKHTISARAN DAN PELAPORAN KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP DINAS PERHUBUNGAN	71,43 (BB)	71,43 (BB)	100,00 %
3.	MENINGKATNYA PENYELENGGAAN SECARA MENYELURUH TERHADAP PROSES PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	HASIL LEVEL MATURITAS SPIP DINAS PERHUBUNGAN	3	3	100,00 %
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	HASIL PENILAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN	800,00	801,43	100,18 %

**PERBANDINGAN DATA CAPAIAN KINERJA LINTAS YANG LAYAK FUNGSI
TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	Persen	95,762	95,783	100,022

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Ciamis Tahun 2024

RENCANA AKSI

- **MELAKSANAKAN PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN**
- **PELAKSANAAN UJI PETIK LOKASI PARKIR, SOSIALISASI PARKIR BERLANGGANAN DAN PEMBINAAN JURU PARKIR**
- **PELAKSANAAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA, KEGIATAN HARI BESAR LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU**

FAKTOR PENDUKUNG

1. TERSEDINYA KENDARAAN KHUSUS OPERASIONAL UNTUK PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN YAITU 2 (DUA) KENDARAAN MOBIL CRANE DAN 2 (DUA) KENDARAAN PICK UP.
2. TERSEDINYA RESPON CEPAT TERHADAP KENDALA PERLENGKAPAN JALAN MELALUI NOMOR TELEPON DAN MEDIA SOSIAL.

ANGGARAN DAN REALISASI DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian %	Efisiensi %
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.997.903.311	31.110.692.015	887.211.296	97,23	2,77
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	-	100	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.888.918.726	7.359.294.199	529.624.527	93,29	6,71
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.500.000	1.500.000	-	100	-
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	30.000.000	-	100	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	-	100	-

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.462.000	171.693.144	768.856	99,55	0,45
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.475.000	67.025.000	15.450.000	81,27	18,73
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.089.000	140.089.000	-	100	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	147.550.000	117.590.000	29.960.000	79,7	20,30
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.513.000	144.613.000	2.900.000	98,03	1,97
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.025.000	62.925.000	2.100.000	96,77	3,23
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.016.627.585	20.767.663.752	248.963.833	98,82	1,18
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.684.128.000	1.635.326.720	48.801.280	97,1	2,90
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.800.000	350.485.400	7.314.600	97,96	2,04
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.815.000	238.486.800	1.328.200	99,45	0,55
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.925.798.112	6.745.003.054	180.795.058	97,39	2,61
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.843.795.962	2.834.645.962	9.150.000	99,68	0,32
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	870.464.500	847.167.250	23.297.250	97,32	2,68

3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	21.967.000	21.964.000	3.000	99,99	0,01
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	146.833.500	145.906.183	927.317	99,37	0,63
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	282.290.000	184.480.000	97.810.000	65,35	34,65
6	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.500.000	80.000.000	500.000	99,38	0,62
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	618.117.000	615.372.979	2.744.021	99,56	0,44
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	176.627.650	176.267.650	360.000	99,8	0,20
9	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	316.459.000	283.459.000	33.000.000	89,57	10,43
10	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.272.791.000	1.259.842.529	12.948.471	98,98	1,02
11	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	10.000.000	10.000.000	-	100	-

12	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	154.700.000	154.700.000	-	100	-
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.675.000	73.675.000	-	100	-
14	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.650.000	14.650.000	-	100	-
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	42.927.500	42.872.501	54.999	99,87	0,13
JUMLAH		38.923.701.423	37.855.695.069	1.068.006.354	97,26	2,74

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Ciamis Tahun 2024

**5. DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA :
RINGKASAN ANGGARAN TAHUN 2024**

URAIAN	ANGGARAN
BELANJA DAERAH	12.036.404.132
A. BELANJA OPERASI	11.704.004.132
BELANJA PEGAWAI	2.847.021.432
BELANJA BARANG DAN JASA	8.856.982.700
B. BELANJA MODAL	332.400.000
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	316.400.000
BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI (BELANJA MODAL JARINGAN LISTRIK LAINNYA - BELANJA CONTROL PANEL)	16.000.000

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
URUSAN KOMINFO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1) PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (7 SUB KEGIATAN) 2) ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (3 SUB KEGIATAN) 3) ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (6 SUB KEGIATAN) 4) PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (2 SUB KEGIATAN) 5) PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2 SUB KEGIATAN) 6) PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (3 SUB KEGIATAN) 	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEMILIKI 3 URUSAN, 5 PROGRAM, 11 KEGIATAN DAN 37 SUB KEGIATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1) PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (4 SUB KEGIATAN) 	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> 1) PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (1 SUB KEGIATAN) 	

		2) PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (3 SUB KEGIATAN)	
URUSAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1) PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA (4 SUB KEGIATAN)	
URUSAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1) PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (2 SUB KEGIATAN)	

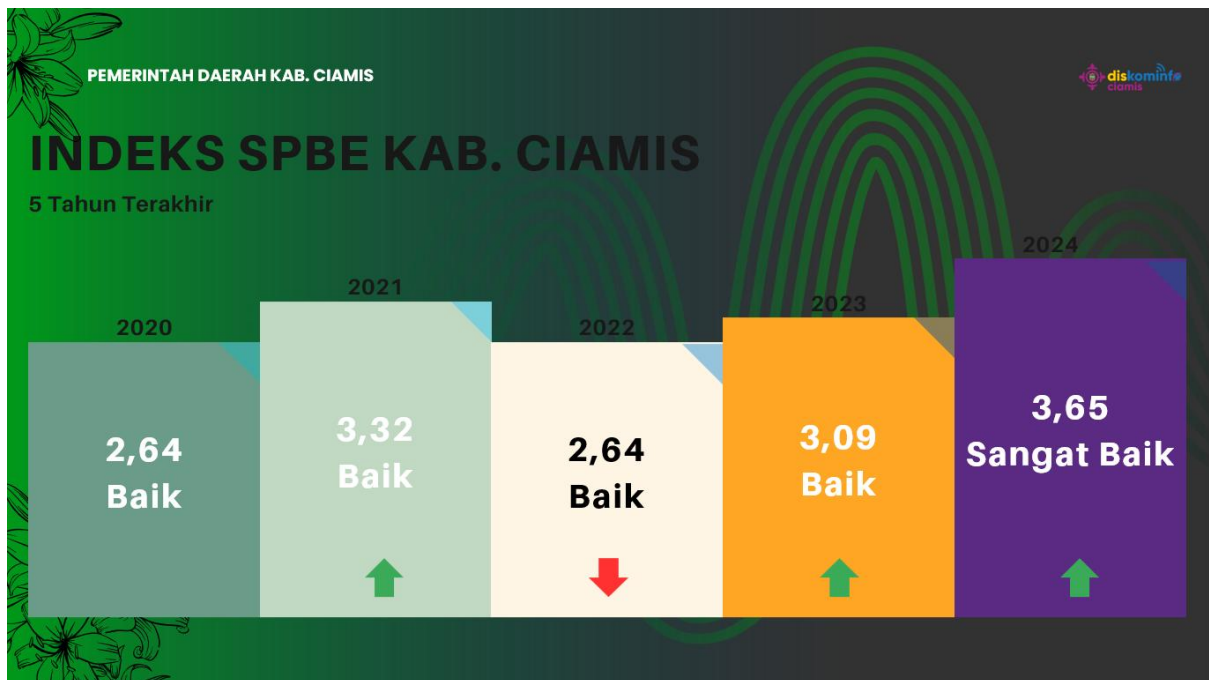
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

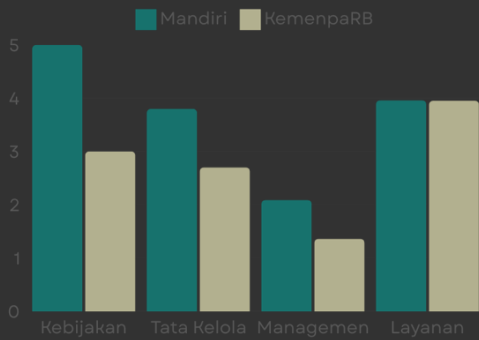
TOTAL ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024	12.036.404.132	11.302.743.626	93,90%
---	-----------------------	-----------------------	---------------

CAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024

DASAR HUKUM

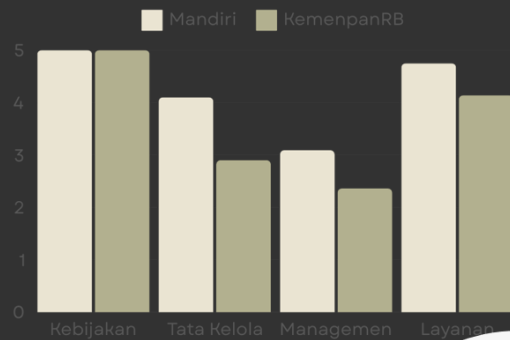
1. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 95 TAHUN 2018, TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 59 TAHUN 2020, TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
3. PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 11 TAHUN 2023, TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS
4. KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS (KEPBUP) NOMOR 555/KPTS.180-HUK/2021, TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN CIAMIS





2023 - 3.09

Memiliki Keunggulan pada Domain Layanan yang telah memanfaatkan digitalisasi secara optimal, dan dukungan kebijakan yang baik, namun kurang pada sisi manajemen dan perlu peningkatan pada tatakelola.



2024 - 3.65

Memiliki Keunggulan pada Domain Kebijakan dengan nilai maksimal yaitu 5 serta adanya peningkatan pada management dan tata kelola dengan semakin baiknya implementasi layanan spbe.

APA YANG MENJADI PEMBEDA ?

SOLUSI 2024 BERDASARKAN LHE SPBE 2023



01 Reviu Domain Kebijakan SPBE

02 Perbaiki Tata Kelola SPBE

Membuat Rancangan Standarisasi Pembangunan Aplikasi untuk mencegah terjadinya duplikasi dan inefisiensi anggaran pada layanan spbe.

03 Perbaiki Management SPBE

- Melaksanakan Audit TIK di Internal Pemda bekerjasama dengan Inspektorat
- Menerapkan Management Risiko SPBE pada penyelenggaraan SPBE.

03 Peningkatan Layanan SPBE

- Mendorong Kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan TIK.

SASARAN STRATEGIS

2025



Perancangan Arsitektur dan Proses Bisnis Terintegrasi

Layanan Pemerintahan Digital, Proses Bisnis Terintegrasi, Interoperabilitas Antar Instansi



Peningkatan SDM Aparatur TIK

Pelatihan rutin bagi tenaga IT di Pemda, Implementasi digitalisasi berbasis kebutuhan daerah

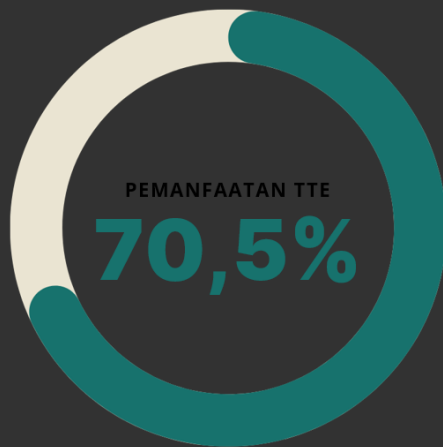


Implementasi Smartvillage

Mempercepat transformasi digital di desa, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong ekonomi berbasis digital.

E-SIGNATURE

IMPLEMENTASI SURAT DIGITAL



TTE

E-Signature berperan penting dalam efisiensi administrasi, keamanan data, dan percepatan layanan publik. dalam wujud implementasi smartcity dan smartvillage pemerintah kabupaten ciamis melakukan langkah nyata dengan mendorong ketersediaan layanan yang menggunakan tandatangan elektronik di berbagai sektor.

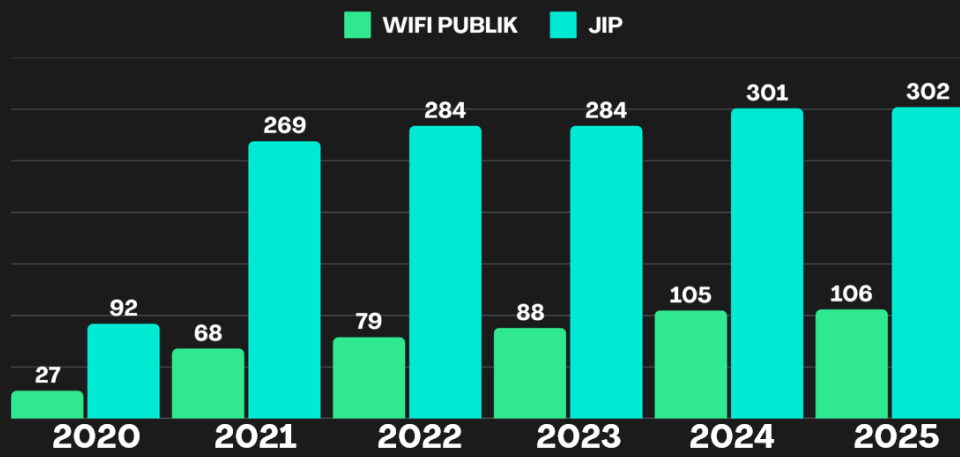
50%

Pemerintah Daerah

91%

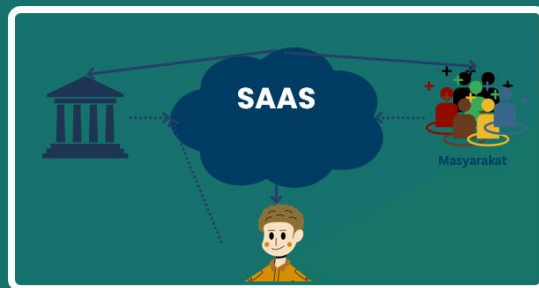
Desa

TOTAL JIP DAN WIFI PUBLIK KAB. CIAMIS

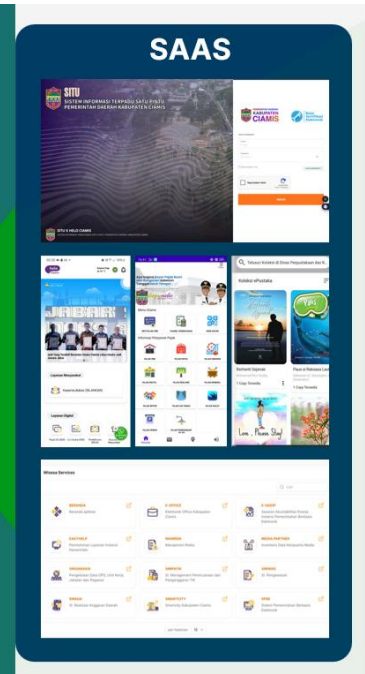


Berikut adalah rekap data Jaringan Intra Pemerintah dan Wifi Publik di Kabupaten Ciamis berdasarkan jumlah titik layanan dari tahun 2020 hingga kuartal awal 2025.

FRAMEWORK TEKNOLOGI INFORMASI



SaaS (Software as a Service) adalah model layanan perangkat lunak berbasis cloud di mana pengguna dapat mengakses aplikasi melalui internet tanpa perlu menginstalnya secara lokal di perangkat mereka.



LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PRODUK DAN CAPAIAN

Platform

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
| 1 | PPID | 2 | SP4N LAPOR |
| 3 | CALL CENTER
112 | 4 | CIAMIS LIBAS
HOAKS (CLIKS) |

(2025) 41.532.000 viewers dan di kunjungi sebanyak 28.216.000 visitor.

- a) Youtube mencapai hampir 20.000 subscribers
- b) Instagram mencapai 21.998 followers,
- c) Tiktok 10.727 followers

PEMERINTAH DAERAH KAB. CIAMIS



SMART VILLAGE

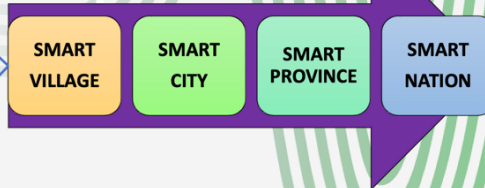


SUPER APPS
DESA

228/258 Desa (website)



236/258 DESA (TTE)



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

WEBSITE

88%

TTE DESA

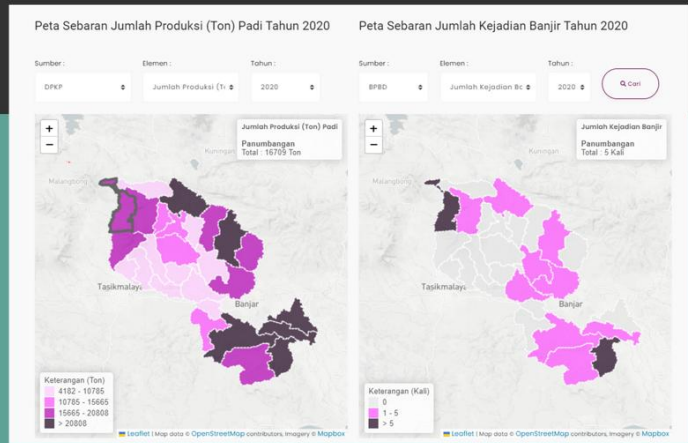
91%

KEAMANAN INFORMASI

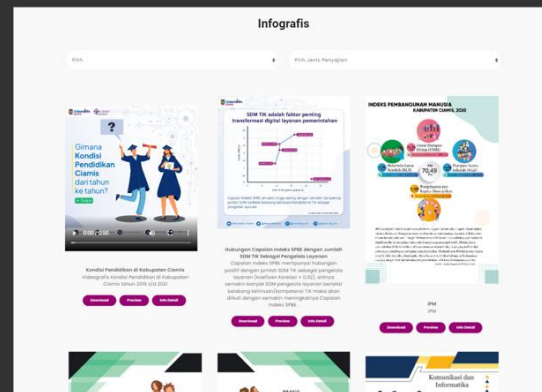
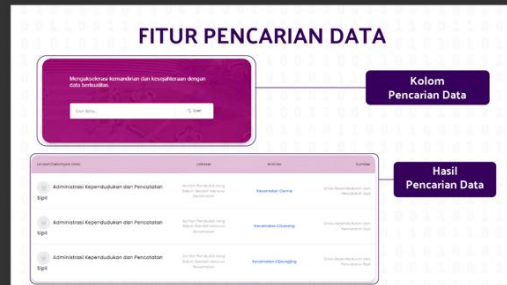


Ciamis Sadata adalah kebijakan tata kelola data yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai

<https://data.ciamiskab.go.id>



SADATA CIAMIS





PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS) secara spesifik mengukur tentang penyelenggaraan statistic sektoral.
- IPS Sangat Berkaitan dengan SPBE, Khususnya dalam hal standar data dan metadata
- Perkembangan IPS Kabupaten Ciamis



2023
2,83
Predikat : Baik
Penghargaan Anindhita
Wistara Data

2024
2,92
Predikat : Baik
Penghargaan Anindhita
Wistara Data

DARI DESKRIPSI TERSEBUT DI ATAS, PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 YANG DILAKSANAKAN OLEH MITRA KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, SECARA UMUM TELAH BERJALAN DENGAN BAIK TERUTAMA YANG MENYANGKUT PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. AKAN TETAPI KITA MENYADARI BAHWA DALAM IMPLEMENTASINYA MASIH TERDAPAT KENDALA DAN HAMBATAN, UNTUK MENJADI BAHAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KITA BERSAMA DI MASA MENDATANG.

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TELAH SESUAI DENGAN SASARAN YANG TERTUANG DALAM RPJMD TAHUN 2019-2024, WALAUPUN DISADARI BELUM MENUNJUKKAN HASIL YANG OPTIMAL.

III. KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, KAMI SAMPAIKAN KESIMPULAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SISTEMATIKA DAN FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.
2. DALAM HAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI OPD MITRA KOMISI C, MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA, SEBAGIAN BESAR REALISASI PROGRAM

DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG DITETAPKAN DENGAN HASIL CAPAIAN KINERJA BERVARIASI.

3. HASIL PENGUKURAN KINERJA DAN INDIKATOR SASARAN, MASIH TERLIHAT ADANYA BEBERAPA INDIKATOR SASARAN YANG BELUM MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN. HAL TERSEBUT MENJADI CATATAN DAN BAHAN EVALUASI BAGI SELURUH JAJARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CIAMIS DALAM UPAYA MEMPERBAIKI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KINERJA DI MASA MENDATANG.

IV. REKOMENDASI

REKOMENDASI KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS, TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 TERHADAP MITRA KOMISI C, SEBAGAI BERIKUT :

1. DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

- a. KONDISI SAAT INI KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN CIAMIS TELAH MEMILIKI KEMANTAPAN YANG BAGUS, MAKA DIREKOMENDASIKAN UNTUK MENJAGA KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN TERSEBUT.
- b. DIREKOMENDASIKAN UNTUK MELANJUTKAN KEMBALI PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG ANTARA DESA WANASIGRA DENGAN DESA MARGALUYU.
- c. MEMPERHATIKAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DENGAN MENAMBAH ANGGARAN PEMELIHARAAN.

2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN CIAMIS

- a. MEMPERTAHANKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT PEDULI LINGKUNGAN.
- b. MENINGKATKAN DAN MENAMBAH PENGELOLAAN BANK SAMPAH DISETIAP DESA

3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

- a. BAPPEDA AGAR MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YG BERLAKU
- b. BAPPEDA AGAR MENGOPTIMALKAN FUNGSI KELITBANGAN SBG BAHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

4. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

- a. DALAM RANGKA MENINGKATKAN INDEKS KESELAMATAN LALU LINTAS PERLU MEMASTIKAN DAN MENINGKATKAN PERLENGKAPAN JALAN BERUPA RAMBU DAN PJU BERFUNGSI DENGAN BAIK.

- b. PERLU ADANYA PENINGKATAN BIAYA PEMELIHARAAN AGAR PERLENGKAPAN JALAN DAPAT BERFUNGSI DENGAN BAIK.

5. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

- a. PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK AGAR DIOPTIMALKAN, TERMASUK SARANA PRASARANA PENUNJANG DAN MEDIA DISEMINASI INFORMASINYA.
- b. PENGGUNAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAHAN AGAR DIOPTIMALKAN TERUTAMA UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH.
- c. PENAMBAHAN JUMLAH DATASET DATA SECTORAL AGAR DITINGKATKAN TERMASUK DATA SECTORAL TINGKAT DESA SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI DESA CERDAS (SMART VILLAGE).
- d. PENINGKATAN KAPASITAS SDM KEAMANAN INFORMASI DAN SARANA PRASARANA PENUNJANGNYA.

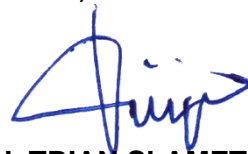
V. PENUTUP

KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI SECARA KOMPREHENSIP, SISTEMATIS DAN LENGKAP, KAMI BERUSAHA AGAR REKOMENDASI INI DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG CUKUP MEMADAI UNTUK MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025.

LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN, DENGAN MENGEDEPANKAN OBJEKTIVITAS DAN RASIONALITAS, BERBEKAL SEMANGAT DAN KEINGINAN SERTA IKHTIAR DENGAN PENUH KESUNGGUHAN UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN DAN REKOMENDASI YANG DAPAT DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERMUARA PADA MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS.

DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI BUAT UNTUK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

CIAMIS, 28 APRIL 2025
KOMISI C DPRD KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



H. TRIAN SLAMET TRIYANA, S.T

LAPORAN

KOMISI D
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
DPRD KABUPATEN CIAMIS

YANG BERTUNGAS MEMBAHAS

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

LAPORAN
KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS
TAHUN 2024

LAPORAN PEMBAHASAN KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI CIAMIS TAHUN 2024, DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. REKOMENDASI
- V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ) BUPATI CIAMIS DISUSUN SEBAGAI AMANAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAAN LKPJ SECARA LEBIH JELAS DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

LKPJ INI MERUPAKAN DESKRIPSI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS SELAMA TAHUN 2024 YANG KOMPREHENSIF, TERINTEGRASI DAN INFORMATIF, DI DALAMNYA DISAJIKAN ASPEK-ASPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDIRI ATAS HASIL KINERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH.

PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI MEMILIKI MAKNA PENTING, KARENA DI DALAMNYA MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, YANG

DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD MITRA KOMISI D, BERUPA CAPAIAN KINERJA DARI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA.

II. PEMBAHASAN

A. MITRA KOMISI D

MITRA KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, YAITU :

1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS SOSIAL
4. DINAS TENAGA KERJA
5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7. KONI
8. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10. BAGIAN KESRA
11. BAZNAS

B. MEKANISME PEMBAHASAN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, MELAKSANAKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI DENGAN MEKANISME DAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYUSUN JADWAL KEGIATAN KOMISI D DAN MENYUSUN DAFTAR INVENTARIS MASALAH;
2. MEMPELAJARI DAN MENGENAL DOKUMEN SECARA CERMAT ANTARA LAIN :
 - a. DOKUMEN LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024;
 - b. DOKUMEN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024;
 - c. RKPD TAHUN 2024;
 - d. APBD TAHUN 2024 DAN DOKUMEN LAINNYA;
3. MELAKSANAKAN RAPAT KERJA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) MITRA KOMISI D;
4. MELAKSANAKAN UJI PETIK LAPANGAN DAN KUNJUNGAN KERJA UNTUK MENDAPATKAN BEBERAPA HAL YANG SANGAT BERGUNA

DALAM PENGAMBILAN KESIMPULAN DAN ANALISIS GUNA MENYAMPAIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

5. MELAKSANAKAN *STUDY* BANDING KE DPRD KABUPATEN BANDUNG DAN DPRD KOTA BANDUNG.
6. PENDALAMAN MATERI YANG DIANGGAP PERLU DENGAN BEBERAPA OPD.
7. MENYUSUN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN.
8. HARMONISASI DENGAN SELURUH PIMPINAN FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS.
9. MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PADA RAPAT PARIPURNA INTERNAL.

C. ANALISIS TERHADAP LKPJ

1. ANALISIS TERHADAP FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SECARA RINCI DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

RUANG LINGKUP LKPJ SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 15 DAN 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA.

RUANG LINGKUP LKPJ SESUAI PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 JUGA MEMUAT CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT, DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.

LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI SECARA LEGAL FORMAL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

2. ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024

ANALISIS INI DILAKUKAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA, DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA SERTA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024, DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI SKPD MITRA KERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1) DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286.126.824.456	254.423.859.963
1.1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	135.941.771.155	127.494.093.075
1.2	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	93.175.737.962	72.806.844.162
1.3	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	33.154.315.339	30.630.522.726
1.4	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN	23.855.000.000	23.492.400.000
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.209.442.200	8.072.442.200
2.1	KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA	8.209.442.200	8.072.442.200

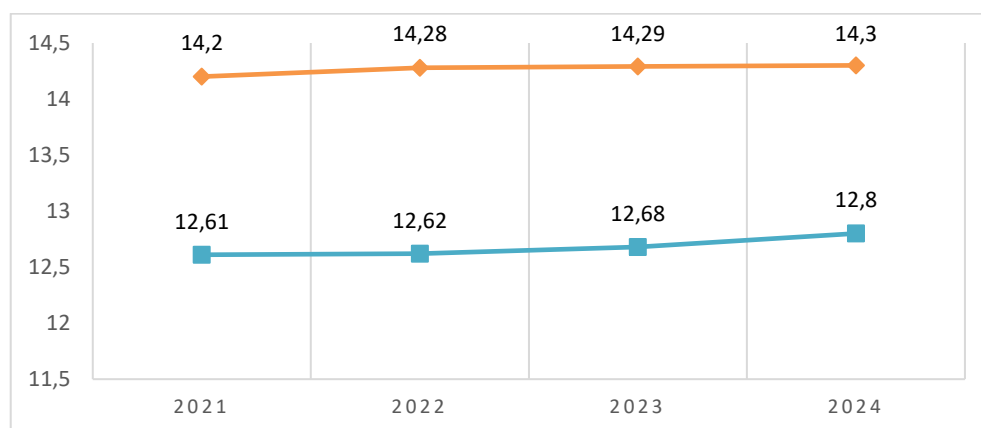
	KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR PAU DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN		
--	--	--	--

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN YANG DIBAYAR KEMBALI PADA TAHUN 2025, SEBAGAI BERIKUT :

- A. PENGELOLAAN PENDIDIKAN SD, SEBESAR :Rp. 6.479.770.042,-
- B. PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMP, SEBESAR : Rp. 19.049.334.750,-
- C. PENGELOLAAN PAUD, SEBESAR : Rp. 1.294.428.754,-
- ± JUMLAH : Rp. 26.823.533.546,-

INDEKS PENDIDIKAN TERDIRI DARI DUA KOMPONEN INDIKATOR YAITU HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH. PENINGKATAN CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) DI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024 SEBESAR 14,3 TAHUN ATAU MENINGKAT 0,01 DARI TAHUN 2023 YAITU 14,29. SEDANGKAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024 YAITU 8,1 TAHUN ATAU MENINGKAT 0,01 TAHUN DIBANDING TAHUN 2023 SEBESAR 8,09 TAHUN. CAPAIAN HLS TERSEBUT LEBIH TINGGI BILA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN HLS JAWA BARAT, SEPERTI TERSAJI PADA GRAFIK DIBAWAH INI:

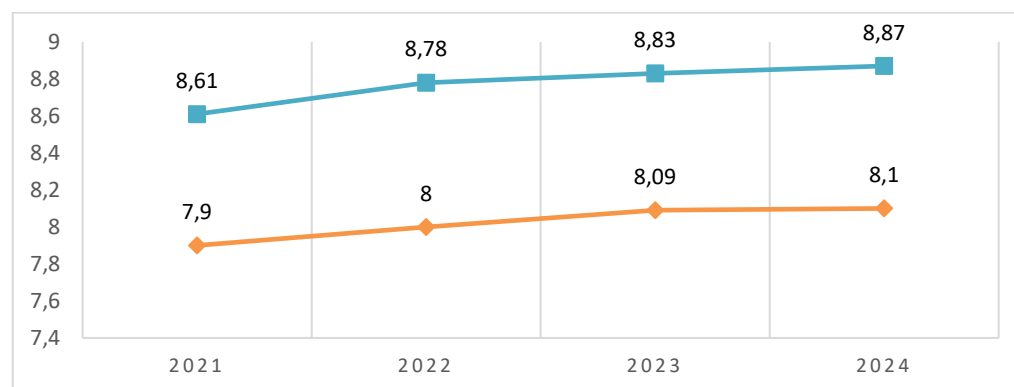
CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2021 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2025 (diolah Bappeda)

SEDANGKAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH, BILA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI JAWA BARAT LEBIH RENDAH, SEPERTI TERSAJI DALAM GRAFIK DI BAWAH INI:

CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2021 – 2024
(TAHUN)



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2025 (diolah Bappeda)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI TARGET KINERJA YANG
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

PROGRAM	TARGET ANGGARAN	REALISASI	KINERJA FISIK (100%)	KINERJA KEUANGAN (100%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	286,126,824,456.00	254,423,859,963.00	100,31	88,92
Indikator Program :				
1. Persentase apk paud formal (usia 5-6 tahun) Dalam Satuan :%	100	100,21	100,21	
2. Persentase apk sd/mi paket a Dalam Satuan :%	100	100,41	100,41	
3. Persentase apk smp/mts/paket b Dalam Satuan :%	100	100,45	100,45	
4. Persentase apm paud formal (usia 5-6 tahun) Dalam Satuan :%	93	93,61	100,66	
5. Persentase apm sd/mi paket a Dalam Satuan :%	99,56	99,57	100,01	
6. Persentase APM SMP/MTs/Paket B Dalam Satuan :%	97,5	97,6	100,1	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8,209,442,200.00	8,072,442,200.00	86,29	98,33
Indikator Program :				
1. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan pnf	92	100	108,7	

Dalam Satuan :%				
2. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan sd Dalam Satuan :%	93	54,1	58,17	
3. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan smp Dalam Satuan :%	96	70,34	73,27	
4. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan tk Dalam Satuan :%	93	97,66	105,01	

2) DINAS KESEHATAN

TAHUN 2024, DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS MEMPEROLEH ANGGARAN SEBESAR Rp. 535.992.836.283,- YANG DAPAT DIREALISASIKAN SEBESAR Rp. 494.597.191.175,- ATAU 92,28 %. PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024 , SEBAGAI BERIKUT :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBESAR 352.781.369.277, REALISASI SEBESAR Rp. 342.907.706.557,- ATAU 97,20 %
- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, SEBESAR Rp. 376.039.097.006, REALISASI SEBESAR Rp. 145.273.948.936,- ATAU 83 %.
- PRAGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, SEBESAR Rp. 5.218.695.000, REALISASI SEBESAR 4.525.989.489,- ATAU 87 %
- PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN, SEBESAR Rp. 485.844.000,- REALISASI SEBESAR Rp. 474.106.700,- ATAU 97.58 %
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN, SEBESAR Rp. 1.467.831.000, REALISASI SEBESAR Rp. 1.415.440.000,- ATAU 96,43 %.

CAPAIAN KINERJA

No.	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%
1	JUMLAH KEMATIAN IBU	KASUS	30	22	126,67
2	JUMLAH KEMATIAN BAYI	KASUS	160	172	92,5
3	PERSENTASE BALITA GIZI BURUK	PERSEN	0,40	0,20	150
4	PERSENTASE BALITA STUNTING	PERSEN	14	3,80	172,85
5	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PERSEN	100	98,68	98,68
6	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	KASUS	100	93,14	93,14
7	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	KASUS	100	98,46	98,46
8	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PERSEN	100	100	100
9	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PERSEN	100	97,71	97,71
10	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN STBM	PERSEN	100	100	100
11	PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF SECARA MANDIRI	KASUS	52	54,30	104,4
12	PERSENTASE POSYANDU STRATA MANDIRI	KASUS	80	83,40	104,25
13	PERSENTASE PHBS RUMAH TANGGA SEHAT	PERSEN	70	73,70	105,28
14	PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN TERAKREDITASI	PERSEN	100	100	100
15	INDEKS KELUARGA SEHAT	NILAI	0,5	0,15	150
16	RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	% RIBU	0,6	0,9	150
17	PERSENTASE CAKUPAN PBI JAMKESDA	PERSEN	100	299,2	299,2
18	BED OCUPANCY RATE (BOR)	PERSEN	75	75,8	99,73
19	PERSENTASE CAKUPAN SPM RUMAH SAKIT	PERSEN	100	87,5	87,5
20	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PERSEN	100	97,27	97,27
21	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PERSEN	100	99,63	99,63
22	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PERSEN	100	99,21	99,21
23	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PERSEN	100	93,31	93,31
24	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES GANGGUAN JIWA BERAT	PERSEN	100	100	100
25	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TBC	PERSEN	100	99,48	99,48
26	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERESIKO TINGGI TERINFEKSI HIV	PERSEN	100	99,93	99,93
27	CAKUPAN DESA UCI	PERSEN	96	66,04	66,04
28	PRESENTASE KEJADIAN LUAR BIASA YANG DITANGANI	PERSEN	100	100	100
29	JUMLAH PUSKESMAS YANG	PKM	25	19	76

	MEMENUHI KETENAGAAN MINIMAL SESUAI STANDAR				
30	PRESENTASE KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL DAN VAKSIN IMUNISASI DASAR PADA PUSKESMAS	PERSEN	100	94,34	94,34
31	PRESENTASE PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN SESUAI STANDAR	PERSEN	100	81,39	81,389
32	LEVEL MATURITAS SPIP	NILAI	3	3	100
33	HASIL EVALUASI AKIP	MULTI	BB	BB	100
34	KINERJA PELAPORAN KEUANGAN	NILAI	600	741,25	123,54
35	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI	81,2	94,64	116,55

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAMIS

ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024, SEBESAR Rp. 173.710.453.456 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 171.444.114.007, CAPAIANNYA 98,70 %.

ANGGARAN TERSEBUT BERSUMBER DARI :

1. APBD KABUPATEN CIAMIS SEBESAR Rp. 35.970.868.022,-
2. BLUD SEBESAR Rp. 121.000.000.000,-
3. DAK SEBESAR Rp. 1.500.000.000,-
4. DBH CHT SEBESAR Rp. 1.549.000.000,-
5. DAU EARMARK SEBESAR Rp. 12.892.000.000,-

REALISASI ANGGARAN RSUD CIAMIS PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

NO	URAIAN	JML	REALISASI	%
A	BELANJA DAERAH	173.710.453.456	171.444.114.007	98,70
1	BELANJA OPERASI	158.665.813.456	156.524.043.617	98,65
2	BELANJA PEGAWAI	72.226.568.398	1.570.483.787	99,09
3	BELANJA BARJAS	86.439.245.058	4.953.559.830	98,28
B	BELANJA MODAL	15.044.640.000	14.920.070.390	99,17
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	12.460.912.900	2.343.686.290	99,36
2	BELANJA MODAL DAN BANGUNAN	1.694.837.100	1.687.894.100	76,00
3	BELANJA JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	888.890.000	888.490.000	53,81
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB CIAMIS	157.669.453.456	156.081.943.367	98,99
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	35.870.868.022	35.685.741.431	99,48
2	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	121.798.585.434	120.396.201.936	98,84
D	PROGRAM PEMENUHAN UOAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.149.000.000	12.044.795.640	99,14
1	PENYEDIAAN FASILITAS	12.049.000.000	11.944.795.640	99,13

	PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
2	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	100.000.000	100.000.000	100
D	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.892.000.000	3.317.375.000	85,23
1	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN OENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WIL KAB/KOTA	3.892.000.000	3.317.375.000	85,23
	JUMLAH	173.710.453.456	171.444.114.007	98,70

REALISASI PENDAPATAN BLUD TAHUN 2024

NO	URAIAN	JML	REALISASI	%
A	PAD	121.000.000.000	119.609.324.550	98,85
	RETRIBUSI DAERAH	121.000.000.000	119.609.324.550	98,85
	RETRIBUSI JASA UMUM	120.693.400.000	119.359.115.953	97,46
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	120.693.400.000	119.359.115.953	97,46
B	LAIN LAIN PAD YANG SAH	306.600.000	250.208.597	81,61
1	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPASHKAN	196.100.000	88.500.000	45,13
2	HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BMD	196.100.000	88.500.000	45,13
3	JASA GIRO	110.481.589	161.708.597	146,34
4	JASA GIRO PADA KAS DI BENDAHARA	110.481.589	161.708.597	146,34

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	25.136	10.096	MENURUN	-59,8 %
BPJS	97.178	113.178	MENINGKAT	16,5 %
ASURANSI	97	130	MENINGKAT	34,0%
SUB TOTAL	122.411	123.404	MENINGKAT	0,8 %

JUMLAH KUNJUNGAN IGD

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	4.234	3.532	MENURUN	16,6 %
BPJS	16.111	18.720	MENINGKAT	16,2 %
ASURANSI	6	1	MENURUN	-83,3 %
SUB TOTAL	20.351	22.253	MENINGKAT	9,3 %

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	3.047	2.826	MENURUN	-7,3 %
BPJS	15.221	17.365	MENINGKAT	14,1 %
ASURANSI	8	68	MENINGKAT	750 %
SUB TOTAL	18.276	20.259	MENINGKAT	0,9 %

JUMLAH KUNJUNGAN RS

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	32.417	16.454	MENURUN	-49,2 %
BPJS	128.510	149.263	MENINGKAT	16,1 %
ASURANSI	111	199	MENINGKAT	79,3%
SUB TOTAL	161.038	165.916	MENINGKAT	3,0 %

KINERJA RAWAT INAP

INDIKATOR	ANGKA IDEAL	2023	2024
BOR (BED OCCUPANCY RATE)	70 – 85 %	51,3	74,8
LOS (LENGHT OF STAY)	6 – 9 HARI	3,2	3,1
TOI (TURN OVER INTRERVAL)	1 – 3 HARI	4,2	1,2
BTO (BED TURN OVER)	40-50 KALI/TH	41,5	66,1
NDR (NET DEATH RATE)	KURANG 2,5 %	2,36	1,83
GDR (GROSS DEATH RATE)	KURANG 4,5 %	4,52	3,93

CAPAIAN IKM RS

CAPAIAN IKM SMESTER 1 TAHUN 2024 : 86,36 (BAIK)

CAPAIAN IKM SMESTER 2 TAHUN 2024 : 86,57 (BAIK)

CAPAIAN SPM RS

CAPAIAN SPM TAHUN 2024 = 87,2 %

DARI 172 INDIKATOR SPM, CAPAIAN SPM YANG MEMENUHI STANDAR MENCAPAI 150 INDIKATOR.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	SATUAN
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP RSUD	CAPAIAN NILAI EVALUASI AKIP	BAIK	-	MUTU
	CAPAIAN NILAI IKM	90	86,57	%
	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	900	-	POIN
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RSUD	BED OCCUPANCY RATE	75	74,8	%
	COST RECOVERY RATE	80	86,22	%
	CAPAIAN SPM RUMAH SAKIT	100	87,2	%

RUMAH SAKIT UMUM KAWALI

ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAWALI PADA TAHUN 2024, SEBESAR Rp. 39.656.076.460 DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 31.154.078.279, CAPAIANNYA 78,56%.

ANGGARAN TERSEBUT BERSUMBER DARI :

1. APBD KABUPATEN CIAMIS SEBESAR Rp. 9.138.115.179
2. BLUD SEBESAR Rp. 7.500.000.000
3. DAK SEBESAR Rp. 1.500.000.000
4. DBH CHT SEBESAR Rp. 3.168.887.480
5. DAU EARMARK SEBESAR Rp. 5.865.074.254
6. PBH PAJAK ROKOK SEBESAR Rp. 12.483.999.547

REALISASI ANGGARAN RSUD KAWALI PADA TAHUN 2024,
SEBAGAI BERIKUT :

NO	URAIAN	JML	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	39.656.076.460	31.154.078.279	78,56
A	BELANJA OPERASI	27.935.217.186	22.191.918.429	79,44
1	BELANJA PEGAWAI	9.190.435.179	9.131.747.443	99,36
2	BELANJA BARJAS	18.744.782.007	13.060.170.986	69,67
B	BELANJA MODAL	11.720.859.274	8.962.159.850	76,46
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	11.714.859.274	8.956.159.850	76,45
2	BELANJA MODAL DAN BANGUNAN	-	-	-
3	BELANJA JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-
4	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	6.000.000	6.000.000	100%
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB. CIAMIS	16.638.115.179	16.086.612.969	96,69
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.138.115.179.	9.079.427.443	99,36
2	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	7.500.000.000	7.007.185.526	93,43
D	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.017.961.281	15.067.465.310	65,46
1	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.369.446.858	11.217.044.564	61,06
2	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.445.364.673	3.725.173.746	83,80
3	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	203.149.750	125.247.000	61,65
E	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-
1	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WIL KAB/KOTA	-	-	-
	JUMLAH	39.656.076.460	31.154.078.279	78,56

REALISASI PENDAPATAN BLUD TAHUN 2024

NO	URAIAN	JML	REALISASI	%
	PAD	7.500.000.000	8.557.047.125	114,09 %
A	RETRIBUSI DAERAH	7.480.000.000	8.536.671.135	114,13 %
1	RETRIBUSI JASA UMUM	-	-	-
2	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	7.480.000.000	8.536.671.135	114,13%
B	LAIN LAIN PAD YANG SAH	20.000.000	20.375.991	101,88 %
1	HASIL PEMANFAATAN BMD YANG TIDAK DIPASHKAN	-	-	-
2	HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BMD	-	-	-
3	JASA GIRO	-	-	-
4	JASA GIRO PADA KAS DI BENDAHARA	20.000.000	20.375.991	101,88%

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	4.439	5.137	MENINGKAT	115,72 %
BPJS	5.808	7.673	MENINGKAT	132,11 %
ASURANSI	-	-	-	-
SUB TOTAL	10.247	12.810	MENINGKAT	125,01 %

JUMLAH KUNJUNGAN IGD

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	575	2.565	MENINGKAT	446,08 %
BPJS	2.561	3.531	MENINGKAT	137,87 %
ASURANSI	-	-	-	-
SUB TOTAL	3.136	6.096	MENINGKAT	194,38 %

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	2.032	734	MENURUN	36,12 %
BPJS	1.921	2.772	MENINGKAT	144,29 %
ASURANSI	-	-	-	-
SUB TOTAL	3.593	3.506	MENURUN	97,57 %

JUMLAH KUNJUNGAN RS

KELAS PELAYANAN	2023	2024	TREND	CAPAIAN
UMUM	7.046	8.436	MENINGKAT	119,72 %
BPJS	10.290	13.976	MENINGKAT	135,82 %
ASURANSI	-	-	-	-
SUB TOTAL	17.336	22.412	MENINGKAT	129,28 %

KINERJA RAWAT INAP

INDIKATOR	ANGKA IDEAL	2023	2024
BOR (BED OCCUPANCY RATE)	60-85 %	30,11 %	45,28 %
LOS (LENGHT OF STAY)	6-9 hari	2,35 hari	2,41 hari
TOI (TURN OVER INTRERVAL)	1-3 hari	0,69 hari	3,15 hari
BTO (BED TURN OVER)	40-50 Kali	48,75 kali	23,31 kali
NDR (NET DEATH RATE)	<45 permil	17,70 permil	14,48 per mill
GDR (GROSS DEATH RATE)	<25 permil	4,83 permil	3,34 permill

CAPAIAN IKM RS

CAPAIAN IKM SEMESTER 1 TAHUN 2024 : 85,28 % (BAIK)

CAPAIAN IKM SEMESTER 2 TAHUN 2024 : 89,56 % (SANGAT BAIK)

CAPAIAN SPM RS

CAPAIAN SPM TAHUN 2024 =72,70 %

DARI 105 INDIKATOR SPM, CAPAIAN SPM YANG MEMENUHI STANDAR MENCAPAI 76 INDIKATOR.

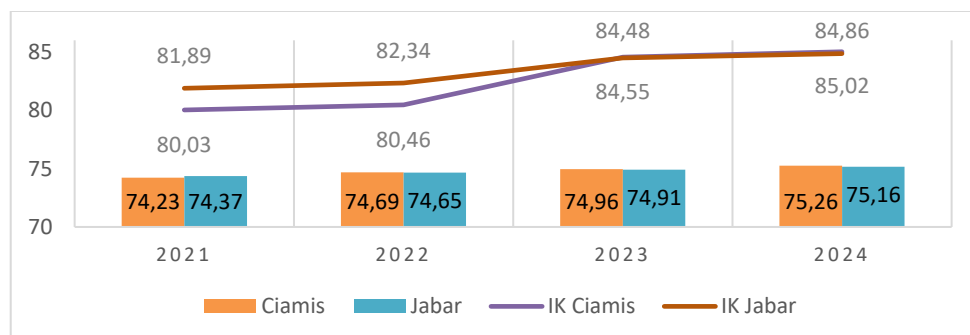
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	SAT
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP RSUD	CAPAIAN NILAI EVALUASI AKIP	78,40	100%	Mutu
	CAPAIAN NILAI IKM	85	103,15%	%
	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	600	741,25	Poin
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RSUD	BED OCCUPANCY RATE	60,00	45,28	%
	COST RECOVERY RATE	80	152,5	%
	CAPAIAN SPM RUMAH SAKIT	100	72,70	%

INDEKS KESEHATAN YANG MENDUKUNG KEPADA CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNGAN MANUSIA (IPM) YAITU INDIKATOR USIA HARAPAN HIDUP. USIA HARAPAN HIDUP DI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024 SEBESAR 75,26 TAHUN ATAU MENINGKAT 0,3 TAHUN DIBANDINGKAN TAHUN 2023 SEBESAR 74,96 TAHUN. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN PROVINSI JAWA BARAT, MAKA UHH KABUPATEN CIAMIS LEBIH

TINGGI DIBANDING UHH PROVINSI JAWA BARAT (75,16),
SEPERTI TERSAJI DALAM GRAFIK BERIKUT INI:

CAPAIAN USIA HARAPAN HIDUP TAHUN 2021 – 2024 (TAHUN)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025 (diolah Bappeda)

3) DINAS SOSIAL

ANGGARAN DINAS SOSIAL PADA TAHUN 2024 SEBESAR Rp. 13.705.313.384,- REALISASI SEBESAR Rp.8.504.284.695,- ATAU SEBESAR 62,05 %. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DINAS SOSIAL PADA TAHUN 2024 SEBAGAI BERIKUT :

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.761.021.009	4.532.666.920	95,20
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.000.000	18.000.000	100,00
1.1.1	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.000.000	18.000.000	100,00
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.137.488.009	2.970.547.315	94,68
1.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.125.488.009	2.958.547.315	94,66
1.2.2	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00
1.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	684.625.000	670.452.700	97,93
1.3.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.700.000	20.700.000	100,00
1.3.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	99.500.000	99.500.000	100,00
1.3.3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	88.125.000	87.305.000	99,07
1.3.4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	65.000.000	62.986.200	96,90
1.3.5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	206.375.000	206.250.000	99,94
1.3.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	204.925.000	193.711.500	94,53

1.4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.000.000	1.000.000	100,00
1.4.1	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.000.000	1.000.000	100,00
1.5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	436.707.500	432.057.505	98,94
1.5.1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	56.607.500	52.257.505	92,32
1.5.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	380.100.000	379.800.000	99,92
1.6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	483.200.500	440.609.400	91,19
1.6.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	325.200.000	288.608.900	88,75
1.6.2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	158.000.500	152.000.500	96,20
1.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	980.925.000	844.010.000	86,04
1.7.1	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.925.000	844.010.000	86,04
1.7.1.1	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	523.175.000	522.375.000	99,85
1.7.1.2	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	157.000.000	157.000.000	100,00
1.7.1.3	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	5.000.000	3.500.000	70,00
1.7.1.4	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	276.550.000	141.935.000	51,32
1.7.1.5	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	19.200.000	19.200.000	100,00
1.8	PROGRAM PENANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000	3.500.000	70,00
1.8.1	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN	5.000.000	3.500.000	70,00
1.8.1.1	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	5.000.000	3.500.000	70,00
1.9	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.111.267.875	1.068.912.775	96,19

1.9.1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	455.517.875	417.562.775	91,67
1.9.1.1	PENYEDIAAN PERMAKANAN	20.000.000	19.500.000	97,50
1.9.1.2	PENYEDIAAN SANDANG	25.000.000	24.000.000	96,00
1.9.1.3	PENYEDIAAN ALAT BANTU	21.500.000	20.500.000	95,35
1.9.1.4	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	256.817.875	230.832.775	89,88
1.9.1.5	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	12.200.000	12.200.000	100,00
1.9.1.6	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	100.000.000	95.030.000	95,03
1.9.1.7	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	20.000.000	15.500.000	77,50
1.9.2	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	655.750.000	651.350.000	99,33
1.9.2.1	PENYEDIAAN PERMAKANAN	615.750.000	611.350.000	99,29
1.9.2.2	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	40.000.000	40.000.000	100,00
1.10	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.185.715.000	1.471.555.000	23,79
1.10.1	PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	3.000.000	-	0,00
1.10.1.1	PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR	3.000.000	-	0,00
1.11	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.182.715.000	1.471.555.000	23,80
1.11.1	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.000.000	62.570.000	89,39
1.11.2	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.715.000	220.110.000	99,28
1.11.3	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	5.536.000.000	938.875.000	16,96
1.11.4	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	355.000.000	250.000.000	70,42
1.12	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	575.784.500	498.039.000	86,50
1.12.1	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	296.547.000	238.549.000	80,44
1.12.1.1	PENYEDIAAN MAKANAN	296.547.000	238.549.000	80,44
1.12.2	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	279.237.500	259.490.000	92,93
1.12.2.1	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	279.237.500	259.490.000	92,93
1.13	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	85.600.000	85.600.000	100,00

1.13.1	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	85.600.000	85.600.000	100,00
1.13.1.1	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	85.600.000	85.600.000	100,00
		13.705.313.384	8.504.283.695	62,05

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2023 SEBESAR 7,42% DAN PADA TAHUN 2024 SEBESAR 7,39% ATAU MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 0,03%. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024, SECARA UMUM POSISINYA BERADA DI BAWAH PROVINSI JAWA BARAT.

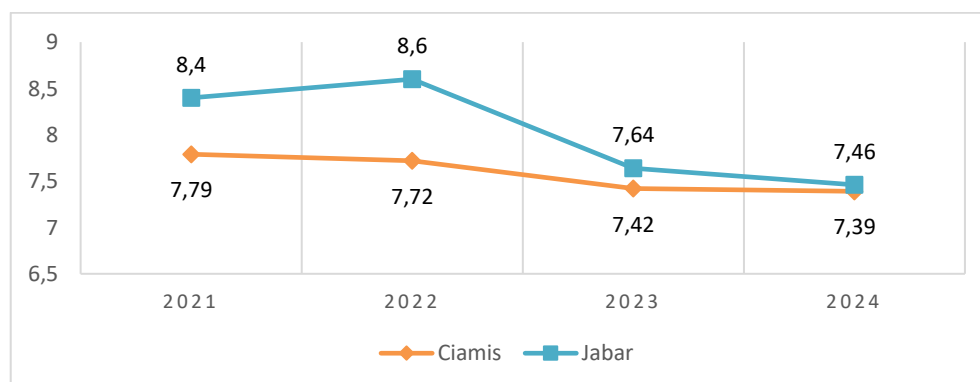
PERKEMBANGAN INDIKATOR KEMISKINAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021-2024

NO	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN			
			2001	2002	2003	2004
1	GARIS KEMISKINAN	Rp/Kap/bln	389.676	405.294	442.108	467.497
2	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JIWA	96.600	93.960	90.840	90.790
3	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	%	7,97	7,72	7,42	7,39
4	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	POIN	0,88	1,07	0,90	0,99
5	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)	POIN	0,15	0,24	0,17	0,20

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2025 (diolah Bappeda)

JIKA DIBANDINGKAN DENGAN ANGKA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN JAWA BARAT DAN NASIONAL, CAPAIAN ANGKA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN CIAMIS SEBESAR 7,39% PADA TAHUN 2024, BERADA DIBAWAH PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI JAWA BARAT SEBESAR 7,46%.

PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN CIAMIS DAN JAWA BARAT TAHUN 2021-2024

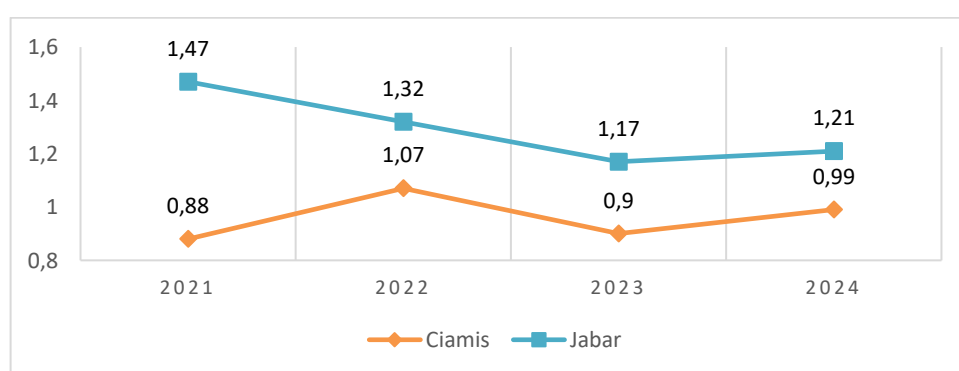


Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2025 (diolah Bappeda)

JIKA DIBANDINGKAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT, KABUPATEN CIAMIS MENEMPATI PERINGKAT 12 DARI URUTAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERENDAH. DIMENSI LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN ADALAH TINGKAT KEDALAMAN DAN KEPARAHAN DARI KEMISKINAN. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) SEBAGAI UKURAN RATA-RATA KESEJANGAN PENGELUARAN MASING-MASING PENDUDUK MISKIN TERHADAP GARIS KEMISKINAN. NILAI INDEKS KEDUANYA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 MENUNJUKKAN KENAIKAN. INI MENGINDIKASIKAN ADANYA PENURUNAN KONDISI KESEJAHTERAAN PADA PENDUDUK MISKIN.

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) MENURUN DARI 0,90 POIN PADA TAHUN 2023 MENJADI 0,99 POIN PADA TAHUN 2024, ARTINYA KENAIKAN NILAI INDEKS INI MENGINDIKASIKAN BAHWA RATA-RATA PENGELUARAN PENDUDUK MISKIN MENDEKAT DARI GARIS KEMISKINAN. KONDISI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024 TERSEBUT DI ATAS KONDISI PROVINSI JAWA BARAT YANG MEMILIKI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN SEBESAR 1,21 POIN.

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN CIAMIS DAN JAWA BARAT TAHUN 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2025 (diolah Bappeda)

4) DINAS TENAGA KERJA

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

No.	URAIAN PROG/KEG	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.887.896.252	2.297.397.750	79,55
1.1	KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	2.733.658.752	2.212.055.250	80,92

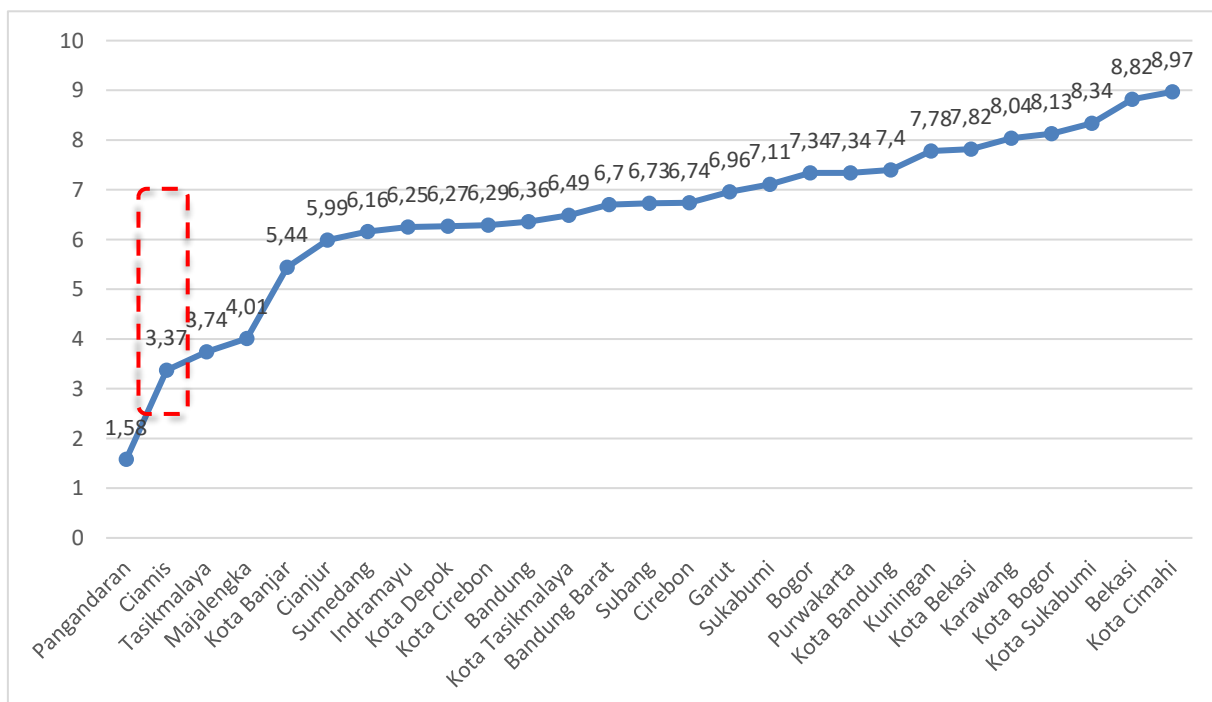
1.1.1	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	2.733.658.752	2.212.055.250	80,92
1.2	KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	154.237.500	85.342.500	55,33
1.2.1	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	154.237.500	85.342.500	55,33
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	150.000.000	150.000.000	100,00
2.1	KEGIATAN PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.202.000	100.202.000	100,00
2.1.1	PELAYANAN ANTAR KERJA	52.625.000	52.625.000	100,00
2.1.2	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	47.577.000	47.577.000	100,00
2.2	KEGIATAN PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.798.000	49.798.000	100,00
2.21	PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	49.798.000	49.798.000	100,00
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	200.000.000	192.725.000	96,36
3.1	KEGIATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000	114.785.000	95,65
3.1.1	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	120.000.000	114.785.000	95,65
3.2	KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.000.000	77.940.000	97,43
3.2.1	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.000.000	77.940.000	97,43

**PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021-2024**

NO	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	5,06	3,75	3,52	3,37
2	ANGKATAN KERJA	Ribu Orang	671,06	664,52	657,80	681,60
3	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	%	69,83	68,47	66,26	68,14
4	TINGKAT KESEMPATAN KERJA	%	94,94	96,25	96,48	96,63
5	PENGANGGURAN	Ribu Orang	33,96	24,92	23,14	22,97
6	BEKERJA	Jiwa	637.372	639.600	634.660	658.620

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2025

**PERBANDINGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN/KOTA SE-JAWA
BARAT**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

- 5) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA LANGSUNG	26.496.487.858	25.548.207.293	97
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.868.258.000	1.817.504.300	97
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	1.030.594.000	992.140.300	96

PEREMPUAN			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	398.670.000	386.443.00	96
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	398.670.000	386.443.00	96
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	631.924.000	605.697.300	94
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	341.403.000	320.428.000	94
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	290.521.000	285.269.300	98
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	159.557.000	159.557.000	100
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.417.000	46.417.000	100
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.417.000	46.417.000	100
PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	82.120.000	82.120.00	100
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	82.120.000	82.120.000	100
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.020.000	31.020.000	100
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	31.020.000	31.020.000	100
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	431.664.000	419.364.000	97
PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	431.664.000	419.364.000	97
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN	431.664.000	419.364.000	97

PEMERINTAH/KOTA			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	246.443.000	246.443.000	100
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.083.000	55.083.000	100
ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN PECEGAHAN KTA	55.083.000	55.083.000	100
PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.360.000	153.360.000	100
KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	153.360.000	153.360.000	100
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.000.000	38.000.000	100
PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.000.000	38.000.000	100
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	24.601.229.858	23.730.702.993	96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.822.269.108	6.383.705.176	94
ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	5.805.508.108	5.501.244.350	95
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.805.508.108	5.501.244.350	95
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	350.000.000	299.162.500	85
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000	50.000.000	100
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	49.780.000	18.557.500	37
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK	49.780.000	18.557.500	37
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	155.220.000	155.220.000	100
BELANJA LANGGANAN JURNAL/SURAT KABAR/MAJALAH	155.220.000	155.220.000	100
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.000.000	50.385.000	72
PENYEDIAAN JASA OPENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	426.761.000	413.318.966	97
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	63.761.000	50.318.966	79
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	363.000.000	363.000.000	100
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	240.000.000	169.979.360	71
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	190.000.000	155.115.360	82
PEMELIHARAAN/REHABILITASI	50.000.000	14.864.000	30

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	140.000.000	119.600.000	85
PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.000.000	119.600.000	85
PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	140.000.000	119.600.000	85
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.732.100.750	10.478.536.317	98
PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PEENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	3.450.166.500	3.271.699.867	95
PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	1.258.966.500	1.145.020.300	91
PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	1.636.200.000	1.571.702.067	95
PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	405.000.000	405.000.000	100
PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	150.000.000	149.977.500	100
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	954.000.000	954.000.000	100
PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	954.000.000	954.000.000	100
PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DIDAERAH KABUPATEN/KOTA	4.077.816.000	4.005.511.000	98
PENEGNDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	64.800.000	28.727.000	44
PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	1.509.238.000	1.494.788.000	99
PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	2.285.032.000	2.280.032.000	100
PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	173.054.000	157.772.000	91
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	2.250.118.250	2.247.325.450	100
PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB	214.868.250	212.057.450	99
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA	2.035.250.000	2.035.250.000	100

DIKAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.906.860.000	6.748.861.500	98
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	6.417.300.000	6.315.726.000	98
PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	432.000.000	338.256.000	78
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	5.985.300.000	5.977.470.000	100
PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	489.560.000	433.135.500	88
PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERESIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, INBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRA, BADUTA/BALITA)	250.000.000	193.988.500	78
PENDAMPINGAN KELUARGA BERESIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	239.560.000	239.147.000	100

6) DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIAMIS MELIPUTI 8 PROGRAM, 19 KEGIATAN DAN 53 SUB KEGIATAN. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI BERIKUT :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.252.918.464	14.988.931.490	64,46
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.705.948.471	5.410.150.847	94,82
1.1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.582.448.471	3.293.687.951	91,94
1.1.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.582.448.471	3.293.687.951	91,94
1.2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	333.363.000	328.592.160	98,57
1.2.1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.920.000	40.825.300	99,77
1.2.2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.000.000	25.000.000	100
1.2.3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.555.000	34.195.000	98,96
1.2.4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	112.000.000	107.705.000	96,17

1.2.5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	120.888.000	120.866.860	99,98
1.3	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.097.184.000	1.096.103.856	99,9
1.3.1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	367.004.000	365.923.856	99,71
1.3.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	730.180.000	730.180.000	100
1.4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	692.953.000	691.766.880	99,83
1.4.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	185.040.500	184.291.600	99,6
1.4.2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	492.802.500	492.365.280	99,91
1.4.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.110.000	15.110.000	100
1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.190.000.000	1.391.862.500	63,56
1.5.1	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	481.680.000	316.010.000	65,61
1.5.1.1	KORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR	266.820.000	131.700.000	49,36
	1. SELEKSI PEMUDA PELOPOR	190.360.000	131.700.000	0
	2. PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR	30.000.000	0	0
	3. PENGIRIMAN PESERTA PEMUDA PELOPOR KE PROVINSI	25.140.000	0	0
	4. PENGIRIMAN PESERTA PEMUDA PELOPOR KE TK. NASIONAL	21.320.000	0	0
1.5.1.2	KORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	150.000.000	139.450.000	92,97
	1. PELATIHAN KEWIRUSAHAAN ANGGOTA PEMUDA	150.000.000	139.450.000	92,97
1.5.1.3	PEMENUHAN HAK SETIAP PEMUDA MELALUI PERLINDUNGAN PEMUDA, ADVOKASI, AKSES PENGEMBANGAN DIRI, PENGGUNAAN PRASARANA DAN SARANA TANPA DISKRIMINATIF, PARTISIPASI PEMUDA DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROGRAM STRATEGIS KEPEMUDAAN	64.860.000	44.860.000	69,16
	1. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KEGIATAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEPRAMUKAAN	64.860.000	44.860.000	69,16
1.5.2	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.708.320.000	1.075.852.500	62,98
1.5.2.1	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEMUDA ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA	300.000.000	199.400.000	66,47
	1. PARTISIPASI PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA	48.600.000	0	0
	2. PAMERAN KEPEMUDAAN TINGKAT	200.000.000	199.400.000	0

	KABUPATEN			
	3. PENDATAAN POTENSI KEPEMUDAAN KABUPATEN CIAMIS	1.400.000	0	0
	4. PENYUSUNAN PROFIL KEPEMUDAAN	50.000.000	0	0
1.5.2.2	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	1.408.320.000	876.452.500	62,23
	1. YOUTH SUMMIT/KEMAH BKATI PEMUDA	150.000.000	135.000.000	90
	2. PEMBINAAN ANGGOTA GEMA GALUH MARCHING BAND	658.320.000	641.452.500	97,44
	3. HIBAH KELOMPOK PEMUDA	600.000.000	100.000.000	16,67
1.6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.666.969.993	6.546.918.143	47,9
1.6.1	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.947.549.993	1.839.176.293	26,47
1.6.1.1	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	6.947.549.993	1.839.176.293	26,47
	1. PIUTANG REVITALISASI LINTASAN SIRKUIT VENUE BMX PENGANGGARAN 2023	920.769.993	920.769.993	100
	2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (PEMBANGUNAN ATAP CANOPY MEMBRANE LAPANG BASKET GALUH) (BKK JABAR)	2.800.000.000	880.943.300	31,46
	3. PEMBEBASAN LAHAN SIRKUIT ROAD RACE	2.778.300.000	0	0
	4. MONEV HIBAH	26.780.000	10.240.000	38,24
	5. LAPANG BANGBAYAN	200.000.000	14.114.000	7,06
	6. LAMPU TENIS INDOOR	221.700.000	13.109.000	5,91
1.6.2	PENYELENGGARAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.388.420.000	1.311.295.850	54,9
1.6.2.1	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	250.000.000	144.926.000	57,97
	1. KEJUARAAN HOCKEY	75.000.000	72.526.000	96,7
	2. KEJUARAAN OR DISABILITAS	50.000.000	0	0
	3. KEJUARAAN ATLETIK	75.000.000	72.400.000	96,53
	4. KEJUARAAN E-SPORT	50.000.000	0	0
1.6.2.2	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	2.138.420.000	1.166.369.850	54,54
	1. PORSENITAS	583.850.000	580.200.000	99,37
	2. PORPMDA	609.050.000	0	0
	3. POPWILDA	407.300.000	404.550.000	99,32
	4. FORPROV	288.220.000	0	0
	5. POSPEDA	100.000.000	97.399.850	97,4
	6. KEJUARAAN GUBERNUR	50.000.000	45.400.000	90,8
	7. PENGIRIMAN ATLET	100.000.000	38.820.000	38,82
1.6.3	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	4.181.000.000	3.329.710.000	79,64
1.6.3.1	PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE)	495.000.000	289.710.000	58,53
	1. BIMTEK PELATIH	59.720.000	0	0
	2. WORKSHOP KEOLAHRAGAAN	59.720.000	0	0
	3. BIMTEK DISABILITAS	59.720.000	46.250.000	0
	4. BIMTEK SPORT SCIENCE	59.720.000	0	0
	5. BIMTEK SILAT	62.815.000	62.815.000	100
	6. BIMTEK TINJU	67.675.000	60.215.000	88,98

	7. WORKSHOP SENAM	62.815.000	60.215.000	95,86
	8. BIMTEK INSTRUKTUR SENAM	62.815.000	60.215.000	95,86
1.6.3.2	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA	3.611.000.000	3.040.000.000	84,19
	1. HIBAH	3.611.000.000	3.040.000.000	84,19
	PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	75.000.000	0	0
	2. PENGHARGAAN ATLET	75.000.000	0	0
1.6.4	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	150.000.000	66.736.000	44,49
1.6.4.1	PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	75.000.000	23.302.000	31,07
	1. FESTIVAL PENCAK SILAT	75.000.000	23.302.000	0
	PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT	75.000.000	43.434.000	57,91
	1. INVITASI OLTRAD	75.000.000	43.434.000	57,91
1.7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.690.000.000	1.640.000.000	97,04
1.7.1	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	1.690.000.000	1.640.000.000	97,04
1.7.1.1	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	1.690.000.000	1.640.000.000	97,04
	1. HIBAH KWARCAB KABUPATEN CIAMIS	1.640.000.000	1.640.000.000	100
	2. HIBAH KWARTIR RANTING SUKAMANTRI	50.000.000	0	0
	3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.274.800.000	1.682.372.500	73,96
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	923.200.000	605.972.500	65,64
2.1	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	338.000.000	79.672.500	23,57
2.1.1	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	338.000.000	79.672.500	23,57
	1. BELAJAR BERSAMA MAESTRO	30.000.000	29.827.500	99,43
	2. PENTAS SENI MUSIK (HAPMI)	58.000.000	0	0
	3. WORKSHOP KESENIAN	50.000.000	49.845.000	99,69
	4. HIBAH	200.000.000	0	0
2.2	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	585.200.000	526.300.000	89,94
2.2.1	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	585.200.000	526.300.000	89,94
	1. DOKUMENTASI KESENIAN DAERAH	25.000.000	22.000.000	88
	2. FESTIVAL COFFEE RAJADESA	112.600.000	111.180.000	98,74
	3. PENTAS SENI LUAR DAERAH	70.000.000	70.000.000	100
	4. PENTAS DALAM DAERAH (TAMPILAN DI KARANGKAMULYAN TIAP MINGGU, CIDOLOG ART, PUSAKANAGARA ART, REV SENI BUHUN)	175.000.000	173.439.000	99,11
	5. BINOJAKRAMA PEDALANGAN	52.600.000	0	0
	6. HELARAN SENI (GEC)	150.000.000	149.681.000	99,79
2.3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	555.000.000	480.550.000	86,59
2.3.1	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	555.000.000	480.550.000	86,59
2.3.1.1	PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA	333.250.000	330.550.000	99,19
	1. PELESTARIAN UPACARA TRADISIONAL	305.000.000	302.300.000	99,11
	2. MANAGEMENT EVENT KEBUDAYAAN	28.250.000	28.250.000	100
2.3.1.2	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH	221.750.000	150.000.000	67,64

	1. ANIMASI SEJARAH	100.000.000	100.000.000	100
	2. PELINDUNGAN NASKAH KUNO	50.000.000	0	0
	3. DIGITALISASI BUDAYA	71.750.000	50.000.000	69,69
2.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	771.600.000	570.850.000	73,98
2.4.1	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	125.000.000	125.000.000	100
2.4.1.1	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	25.000.000	25.000.000	100
	1. REGISTER SITUS DAN CAGAR BUDAYA	25.000.000	25.000.000	0
	PENETAPAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	100.000.000	100
	1. PENETAPAN SITUS DAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	100.000.000	0
2.4.2	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	646.600.000	445.850.000	68,95
2.4.2.1	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	218.600.000	102.600.000	46,94
	1. SERTIFIKASI TACB	41.000.000	0	0
	2. PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA (HARI JADI)	102.600.000	102.600.000	100
	3. DED PEMBANGUNAN JOGLO SITUS RAA KUSUMHSUBRATA	75.000.000	0	0
2.4.2.2	PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA	428.000.000	343.250.000	80,2
	1. PEMBINAAN JURU PELIHARA	100.000.000	93.250.000	0
	2. PEMBINAAN JURU PELIHARA, 2 HARI 75 ORANG TEMPAT PUSAT BUDAYA 100, JT, PAK LUTHFI, 2 ORANG NARSUM DL DD	273.000.000	195.000.000	71,43
	3. PEMBINAAN PENGGIAT BUDAYA	30.000.000	30.000.000	100
	4. EXSPEDISI CAGAR BUDAYA	25.000.000	25.000.000	100
2.4.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	25.000.000	25.000.000	100
2.4.3.1	PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	25.000.000	25.000.000	100
2.4.3.1.1	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	25.000.000	25.000.000	100
	1. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	25.000.000	25.000.000	100

7) KONI

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN KONI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024 DENGAN ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2024 SEBESAR Rp. 1.190.000.000,- SEBAGAI BERIKUT :

- PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX DI ACEH – SUMATRA UTARA
- PORKAB / KEJURKAB YANG DILAKSANAKAN OLEH 22 CABOR DARI 37 CABOR
- PERSIAPAN BABAK KUALIFIKASI PORPROV JABAR YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025.

8) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

No.	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.000.000.000	1.782.644.747	89,13
A.1	<i>KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>1.617.378.500</i>	<i>1.443.069.247</i>	<i>89,22</i>
A.1.1	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	158.178.000	123.523.747	78,09
A.1.2	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	263.980.000	236.110.000	89,44
A.1.3	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	1.133.862.500	1.045.139.500	92,18
A.1.4	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	61.358.000	38.296.000	62,41
A.2	<i>KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>382.621.500</i>	<i>339.575.500</i>	<i>88,75</i>
A.2.1	SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	21.137.500	21.137.500	100,00
A.2.2	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.484.000	69.044.000	99,37
A.2.3	PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	225.045.500	183.279.500	81,44
A.2.4	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	35.485.000	34.895.000	98,34
A.2.5	PEMILIHAN DUTA BACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.469.500	31.219.500	99,21
B	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	138.984.600	137.496.600	98,93
B.1	<i>KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>71.720.800</i>	<i>70.232.800</i>	<i>97,93</i>
B.1.1	PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	71.720.800	70.232.800	97,93
B.2	<i>KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	<i>37.775.000</i>	<i>37.775.000</i>	<i>100,00</i>
B.2.1	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	37.775.000	37.775.000	100,00
B.3	<i>KEGIATAN PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA</i>	<i>29.488.800</i>	<i>29.488.800</i>	<i>100,00</i>
B.3.1	PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	29.488.800	29.488.800	100,00
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.682.763.724	3.473.134.533	94,31
C.1	<i>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>2.845.028.524</i>	<i>2.666.456.127</i>	<i>93,72</i>
C.1.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.845.028.524	2.666.456.127	93,72
C.2	<i>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	<i>268.283.100</i>	<i>265.399.915</i>	<i>98,93</i>
C.2.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.006.500	6.004.500	99,97
C.2.2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK	29.797.500	29.797.500	100,00

	KANTOR			
C.2.3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.002.100	25.658.465	98,68
C.2.4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	110.190.000	109.910.000	99,75
C.D.5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	96.287.000	94.029.450	97,66
C.3	<i>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	<i>369.638.800</i>	<i>346.535.141</i>	<i>93,75</i>
C.3.1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	123.221.000	116.630.641	94,65
C.3.2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.917.800	31.904.500	99,96
C..3.3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	214.500.000	198.000.000	92,31
C.4	<i>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>	<i>199.813.300</i>	<i>194.743.350</i>	<i>97,46</i>
C.4.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	149.813.300	144.805.050	96,66
C.4.2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	50.000.000	49.938.300	99,88

9) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

No.	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.764.281.909	7.184.751.416	92,54
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.427.926.000	2.070.716.800	85,29
B.1	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.022.976.000	1.022.976.000	100,00
B.1.1	PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	467.976.000	467.976.000	100,00
B.1.2	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	555.000.000	555.000.000	100,00
B.2	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.045.310.000	928.263.800	88,80
B.2.1	RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT/WABAH ZONOSIS PRIORITAS	42.000.000	-	0,00
B.2.2	PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	804.310.000	796.825.000	99,07
B.2.3	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	136.500.000	131.438.800	96,29
B.2.4	RESPON CEPAT BENCANA NON ALAM EPIDEMI/WABAH PENYAKIT	62.500.000	-	0,00

B.3	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	359.640.000	119.477.000	33,22
B.3.1	PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	30.745.000	30.741.000	99,99
B.3.2	PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	26.480.000	23.650.000	89,31
B.3.3	KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	288.895.000	51.566.000	17,85
B.3.4	FASILITASI PENGUMPULAN DATA PENDUDUK DI DAERAH RAWAN BENCANA LINTAS KAB/KOTA	13.520.000	13.520.000	100,00
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.336.355.909	5.114.034.616	95,83
C.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.440.000	4.115.000	92,68
C.1.1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	650.000	650.000	100,00
C.1.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	325.000	325.000	100,00
C.1.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	325.000	325.000	100,00
C.1.4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	325.000	-	0,00
C.1.5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	325.000	325.000	100,00
C.1.6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.170.000	2.170.000	100,00
C.1.7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	320.000	320.000	100,00
C.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.189.812.659	3.018.746.665	94,64
C.2.1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.188.592.659	3.017.526.665	94,64
C.2.2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	610.000	610.000	100,00
C.2.3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	610.000	610.000	100,00
C.3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	283.485.532	270.168.151	95,30
C.3.1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	46.340.000	46.327.100	99,97
C.3.2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.410.300	69.016.200	96,65
C.3.3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.622.000	15.622.000	100,00
C.3.4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.750.000	12.600.000	98,82
C.3.5	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	25.000.000	21.757.500	87,03

C.3.6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	112.363.232	104.845.351	93,31
C.4	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.146.141.400	1.146.141.360	100,00
C.4.1	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.146.141.400	1.146.141.360	100,00
C.5	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	347.038.400	346.346.549	99,80
C.5.1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.538.400	74.846.549	99,08
C.5.2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	271.500.000	271.500.000	100,00
C.6	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	365.437.918	328.516.891	89,90
C.6.1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	321.913.918	294.042.891	91,34
C.6.2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.720.000	20.670.000	69,55
C.6.3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	13.804.000	13.804.000	100,00

10) BAGIAN KESRA

BELANJA HIBAH PADA TAHUN 2024 KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI BELANJA HIBAH KEPADA MASJID, MADRASAH DINIYAH, TPA/TKA/RA, LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM, PONDOK PESANTREN, ORMAS ISLAM DAN YAYASAN ISLAM, JUMLAHNYA SEBESAR Rp. 41.903.350.000,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 9.874.000.000,-.ATAU SEBESAR 21,11%.

11) BAZNAS

WILAYAH OPERASI BAZNAS KABUPATEN CIAMIS MELIPUTI SELURUH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS YANG TERDIRI DARI 27 KECAMATAN, 7 KELURAHAN, DAN 265 DESA. BAZNAS KABUPATEN CIAMIS TELAH BERHASIL MELEGALKAN KEPENGURUSAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI SETIAP KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS. PETA SEBARAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT BASIS KEWILAYAHAN DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
CAPAIAN KINERJA BAZNAS KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024, SEBAGAI BERIKUT :

A. RENCANA DAN REALISASI BERDASARKAN PENERIMAAN

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	PENERIMAAN DANA ZAKAT	2.530.000.000	8.128.014.071	321,27
1	PENERIMAAN DANA ZAKAT MAAL PERORANGAN	500.000.000	163.749.155	32,75
2	PENERIMAAN DANA ZAKAT MAAL BADAN	500.000.000	150.356.000	30,07
3	PENERIMAAN DANA ZAKAT MAL-PERORANGAN VIA UPZ	1.530.000.000	7.813.908.916	510,71
4	PENERIMAAN DANA ZAKAT FITRAH	0	0	
5	PENERIMAAN DANA ZAKAT FITRAH VIA UPZ	0	0	
B	PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH	19.470.000.000	13.909.198.228	71,44
1	PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH TIDAK TERIKAT	1.500.000.000	2.369.352.309	157,96
2	PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH TERIKAT	0	51.520.000	
3	PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH VIA UPZ	17.970.000.000	11.488.325.919	63,93
C	PENERIMAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	0	0	
1	PENERIMAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	0	0	
D	PENERIMAAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	0	0	
1	PENERIMAAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (HIBAH, NAZAR, PUSAKA YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS, QURBAN, KAFARAT, FIDYAH, DENDA ATAU SITAAN PENGADILAN AGAMA, DAN LAIN SEBAGAINYA)	0		
2	PENERIMAAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA VIA UPZ	0	0	
E	DANA HIBAH	1.000.000.000	1.405.000.000	140,5
1	PENERIMAAN DANA HIBAH PENYALURAN	1.000.000.000	1.405.000.000	140,50
2	PENERIMAAN DANA HIBAH (INFAK) OPERASIONAL (NON-APBN/D)	0	0	
	SUB TOTAL PENERIMAAN	23.000.000.000	23.442.212.299	101,92
F	DANA ZIS DI LUAR NERACA (BAZNAS/LAZ)	163.000.000.000	160.449.050.600	98,44
1	PENERIMAAN DANA ZAKAT MALL	0	0	
2	PENERIMAAN DANA ZAKAT FITRAH	30.000.000.000	38.004.680.000	126,68
3	PENERIMAAN DANA INFAK	1.500.000.000	921.870.600	61,46
4	PENERIMAAN DANA KURBAN/DSKL	131.500.000.000	121.522.500.000	92,41
	TOTAL PENERIMAAN	186.000.000.000	183.891.262.899	98,87

B. RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PENYALURAN DANA	19.858.587.500	17.473.842.443	87,99
1	PENYALURAN DANA UNTUK PROGRAM CIAMIS PEDULI	6.905.587.500	5.016.871.600	72,65
2	PENYALURAN DANA UNTUK PROGRAM CIAMIS SEJAHTERA	1.240.500.000	159.657.900	12,87
3	PENYALURAN DANA UNTUK PROGRAM CIAMIS CERDAS	3.405.000.000	1.594.673.600	46,83
4	PENYALURAN DANA UNTUK PROGRAM CIAMIS SEHAT	2.690.500.000	2.293.862.700	85,26
5	PENYALURAN DANA UNTUK PROGRAM CIAMIS AGAMIS	5.617.000.000	8.408.776.643	149,70
	TOTAL PENYALURAN	19.858.587.500	17.473.842.443	87,99

C. RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PENERIMA MANFAAT

No.	KETERANGAN	RENCANA	REALISASI	(%)
A	PENGGALANGAN MUZAKI	163.241	162.278	99,41%
1	MUZAKI	991	45.943	4636,02%
2	MUNFIK	162.250	116.326	71,70%
3	DONATUR CSR / PKBL	TIDAK TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA	TIDAK TERSEDIA
4	DONATUR DSKL	0	9	
B	PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN BIDANG	35.700	14.839	41,57%
1	PENERIMA MANFAAT PROGRAM CIAMIS CERDAS	10.100	330	3,27%
2	PENERIMA MANFAAT PROGRAM CIAMIS SEHAT	1.950	1005	51,54%
3	PENERIMA MANFAAT PROGRAM CIAMIS PEDULI	17.700	12116	68,45%
4	PENERIMA MANFAAT PROGRAM CIAMIS SEJAHTERA	450	32	7,11%
5	PENERIMA MANFAAT PROGRAM CIAMIS AGAMIS	5.500	1356	24,65%

D. RENCANA & REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

No.	KETERANGAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
A	PENERIMAAN HAK AMIL	3.988.312.500	4.338.796.632	108,79%
1	PENERIMAAN (ALOKASI) HAK AMIL DARI ZAKAT ASNAF AMIL (MAKSIMAL	270.350.000	909.128.068	336,28%

	12,5%)			
2	PENERIMAAN HAK AMIL DARI ZAKAT ASNAF FI SABILILLAH	0	0	
3	PENERIMAAN HAK AMIL DARI INFAK/SEDEKAH	3.017.962.500	2.423.998.397	80,32%
4	PENERIMAAN HAK AMIL DARI DANA CSR	0	0	
5	PENERIMAAN (ALOKASI) HAK AMIL DARI DSKL	0	0	
6	PENERIMAAN DANA AMIL DARI LAINNYA	0	0	
7	SALDO DANA DANA AMIL	700.000.000	1.005.670.167	143,67%
B	PENGGUNAAN HAK AMIL	3.945.812.500	3.488.843.699	88,42%
B.1	KEGIATAN OPERASIONAL AMIL	2.255.298.800	1.840.870.131	81,62%
B.2	BELANJA PEGAWAI	1.143.248.800	1.264.658.300	110,62%
B.3	BIAYA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	460.000.000	160.169.900	34,82%
B.4	BIAYA PERJALANAN DINAS	234.000.000	152.174.400	65,03%
B.5	BEBAN ADMINISTRASI UMUM	303.050.000	188.223.162	62,11%
B.6	BIAYA PENYUSUTAN	75.000.000	75.644.369	100,86%
B.7	BIAYA JASA PIHAK KETIGA	40.000.000	0	0,00%
B.2	ALOKASI SALDO AKHIR DANA AMIL	161.601.200	280.333.828	173,47%
B.3	PENYALURAN DANA AMIL UNTUK UPZ	1.528.912.500	1.367.639.740	89,45%

E. RENCANA & REALISASI PENGGUNAAN DANA APBN/APBD

NO	KETERANGAN	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	PENGGUNAAN DANA APBN / APBD	600.000.000	400.000.000	66,67
B	HAK KEUANGAN PIMPINAN	379.000.000	259.200.000	68,39
B.1	SATUAN AUDIT INTERNAL (SAI)	36.000.000	36.000.000	100,00
B.2	PELAKSANAAN AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK	25.000.000	21.300.000	85,20
B.3	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI UPZ	150.000.000	79.800.000	53,20
B.4	PEMBAYARAN PUBLIKASI UMUM	10.000.000	3.700.000	37,00

DARI DESKRIPSI TERSEBUT DI ATAS, PEMBANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 YANG DILAKSANAKAN OLEH MITRA KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, SECARA UMUM TELAH BERJALAN DENGAN BAIK TERUTAMA YANG MENYANGKUT PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. AKAN TETAPI KITA MENYADARI BAHWA DALAM IMPLEMENTASINYA MASIH TERDAPAT KENDALA DAN HAMBATAN, UNTUK MENJADI BAHAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KITA BERSAMA DI MASA MENDATANG.

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TELAH SESUAI DENGAN SASARAN YANG TERTUANG DALAM RPJMD TAHUN 2019-2024, WALAUPUN DISADARI BELUM MENUNJUKKAN HASIL YANG OPTIMAL.

III. KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, KAMI SAMPAIKAN KESIMPULAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SISTEMATIKA DAN FORMAT LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.
2. DALAM HAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI OPD MITRA KOMISI D, MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN, KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA, SEBAGIAN BESAR REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN YANG DITETAPKAN DENGAN HASIL CAPAIAN KINERJA BERVARIASI.
3. HASIL PENGUKURAN KINERJA DAN INDIKATOR SASARAN, MASIH TERLIHAT ADANYA BEBERAPA INDIKATOR SASARAN YANG BELUM MENCAPI TARGET YANG DITETAPKAN. HAL TERSEBUT MENJADI CATATAN DAN BAHAN EVALUASI BAGI SELURUH JAJARAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CIAMIS DALAM UPAYA MEMPERBAIKI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KINERJA DI MASA MENDATANG.

IV. REKOMENDASI

REKOMENDASI KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 TERHADAP MITRA KOMISI D, SEBAGAI BERIKUT :

1. DINAS PENDIDIKAN

TERKAIT PENDIDIKAN, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PENDIDIKAN :

- MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENDIDIKAN

- MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN PENDIDIKAN KHUSUSNYA BAGI PESERTA DIDIK YANG KURANG MAMPU DAN/ATAU BAGI PESERTA DIDIK YANG BERPRESTASI, PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
- MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH BERBASIS KEAGAMAAN, DAN PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN BERBASIS KETERAMPILAN.
- RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024 YAITU 8,1 TAHUN ATAU MENINGKAT 0,01 TAHUN DIBANDING TAHUN 2023 SEBESAR 8,09 TAHUN, TETAPI APABILA DIBANDINGKAN DENGAN RATA – RATA LAMA SEKOLAH PROVINSI JAWA BARAT YAITU 8,7, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR DINAS PENDIDIKAN MEMILIKI STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PRA SEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH).
- DALAM RANGKA MENINGKATKAN IDENTITAS MASYARAKAT TATAR GALUH CIAMIS, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR MUATAN LOKAL MENJADI PRIORITAS KURIKULUM PENDIDIKAN BAIK DI TINGKAT PAUD, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MAUPUN DI PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN BERBASIS KETERAMPILAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU. RUMUSAN PROGRAM MUATAN LOKAL (MULOK) MELIBATKAN IDENTIFIKASI CIRI KHAS DAN POTENSI DAERAH, SERTA KEBUTUHAN PENDIDIKAN YANG RELEVAN. MULOK DIRANCANG UNTUK MEMBERIKAN SISWA PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TENTANG LINGKUNGAN ALAM, SOSIAL, BUDAYA, DAN SPIRITUAL DI DAERAHNYA.
- MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN KAB CIAMIS.

2. DINAS KESEHATAN

TERKAIT KESEHATAN, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS KESEHATAN, RSU D CIAMIS DAN RSU KAWALI DAN PUSKESMAS :

- MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN BAIK DI RUMAH SAKIT DAERAH MAUPUN DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES.
- UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TENAGA MEDIS BAIK DI RSUD CIAMIS, RSU KAWALI DAN JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI KETENAGAAN MINIMAL SESUAI STANDAR BARU MENCAPAI 18 DARI 37 PUSKESMAS, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR SEGERA MELAKSANAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DOKTER SPESIALIS DILAKUKAN MELALUI PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KERJASAMA KEMITRAAN BAIK DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TERKAIT MAUPUN PERSEORANGAN DAN SEGERA DILAKSANAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM MELALUI PROGRAM BEASISWA DAERAH, KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN GINJAL.
- UNTUK MENGURANGI RESIKO KEMATIAN IBU DAN ANAK AGAR FASILITAS NICU UNTUK SEGERA DILENGKAPI/DITAMBAH.
- TERKAIT CAPAIAN DESA UCI YANG MENCAPAI 66,04 %, KAMI MEREKOMENDASIKAN DINKES MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG KONPREHENSIF.
- JUMLAH KEMATIAN IBU TAHUN 2024 SEBANYAK 22 KASUS DARI TARGET 30 KASUS, CAPAIAN KINERJA MENCAPAI 126,67 %, TETAPI APABILA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH KEMATIAN IBU PADA TAHUN 2023 SEBANYAK 21 KASUS, MENINGKAT ATAU BERTAMBAH 1 KASUS. BEGITUPUN DENGAN JUMLAH KEMATIAN BAYI PADA TAHUN 2024 SEBANYAK 172 KASUS DARI TARGET 160 KASUS, CAPAIAN KINERJA MENCAPAI 92,5 %. APABILA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2023 SEBANYAK 123 KASUS, MENINGKAT ATAU BERTAMBAH 49 KASUS. UNTUK ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR AGAR FASILITAS NICU UNTUK SEGERA DILENGKAPI/DITAMBAH.
- TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP LANSIA YANG MASIH RENDAH DI BEBERAPA PUSKESMAS, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR DINAS KESEHATAN MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG JELAS DAN TERUKUR DI BEBERAPA PUSKESMAS DIMAKSUD.
- TERKAIT BEBAN KASUS BALITA STUNTING DAN KASUS WASTING (GIJI BURUK DAN GIJI KURANG) YANG MENGALAMI PENINGKATAN DI BEBERAPA WILAYAH KECAMATAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR DIOPTIMALKAN BAIK DARI SEGI PENGUKURAN, ALAT YANG DIGUNAKAN, TENAGA PELAKSANA DILAPANGAN YANG TERLATIH DAN PROSES VALIDASI LINTAS PRORGAM DAN SEKTOR.

- TERKAIT JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI), KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR DILAKSANAKAN EVALUASI UNTUK MEMASTIKAN EFEKTIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU. EVALUASI INI MELIPUTI BERBAGAI ASPEK, SEPERTI KESESUAIAN SASARAN, KEPESERTAAN, PEMANFAATAN LAYANAN KESEHATAN, DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN.

3. DINAS SOSIAL

TERKAIT BIDANG SOSIAL, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS SOSIAL

- TERKAIT DATA KEMISKINAN YANG SELAMA INI MENGGUNAKAN DATA DARI BPS DAN DATA KEMENSOS, SEYOGYANYA SEGERA DIBENTUK KELOMPOK KERJA KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PEMUTAKHIRAN DATA, SEHINGGA DATA KEMISKINAN DAPAT TERSAJIKAN DENGAN DATA YANG TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, DAN TEPAT JUMLAH.
- MENGOPTIMALKAN SLRT (SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU) PENANGANAN KEMISKINAN.
- PERBANDINGAN KONDISI PENCAPAIAN INDIKATOR KEMISKINAN TERHADAP TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024, SECARA UMUM CAPAIAN PADA TAHUN 2024 BELUM DAPAT MENCAPAI TARGET RPJMD YANG TELAH DITETAPKAN. UNTUK INDIKATOR JUMLAH PENDUDUK MISKIN, REALISASI PADA TAHUN 2024 SEBANYAK 90.790 JIWA, SEDANGKAN UNTUK INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, REALISASI PADA TAHUN 2024 SEBESAR 7,39%. CAPAIAN TERSEBUT TENTU SAJA MENJADI SUATU TANTANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS UNTUK DAPAT MENURUNKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN, TERUTAMA TERHADAP MASYARAKAT YANG BERADA PADA KELOMPOK RENTAN MISKIN. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2023 SEBESAR 7,42% DAN PADA TAHUN 2024 SEBESAR 7,39% ATAU MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 0,03%. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024, SECARA UMUM POSISINYA BERADA DI BAWAH PROVINSI JAWA BARAT. PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DI PROVINSI JAWA BARAT,

KABUPATEN CIAMIS BERADA PADA URUTAN KE 12 KABUPATEN/KOTA LAINNYA PROVINSI JAWA BARAT. UNTUK ITU, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG JELAS DAN TERUKUR UNTUK MENURUNKAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN.

- TERKAIT BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR SEBARAN BANTUANNYA TEPAT SASARAN DAN DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS, TIDAK MENUMPUK DI WILAYAH SATU KECAMATAN SEPERTI YANG DIREALISASIKAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS PADA TAHUN 2024.

4. DINAS TENAGA KERJA

PADA TAHUN 2024, JUMLAH ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN CIAMIS MENCAPAI 681,60 RIBU JIWA, MENINGKAT DARI KONDISI TAHUN 2023. ANGKATAN KERJA YANG MENJADI PENGANGGURAN ATAU TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENGALAMI PENURUNAN DARI TAHUN 2023 SEBESAR 3,52% MENJADI 3,37% PADA TAHUN 2024. CAPAIAN KONDISI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 BERADA DI PERINGKAT 2 TERENDAH DI PROVINSI JAWA BARAT, UNTUK ITU KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR :

- UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM BAGI PENDUDUK MENJADI MUTLAK TERUS DIGIATKAN, BAIK MELALUI PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN INFORMAL, KARENA INVESTASI PADA *HUMAN CAPITAL* INI DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KONDISI PEREKONOMIAN DI KABUPATEN CIAMIS.
- PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS, DAN DAYA SAING TENAGA KERJA TERUS DILAKUKAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI KABUPATEN CIAMIS. BERBAGAI UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DIANTARANYA PEMBERIAN PELATIHAN TERHADAP PENCARI KERJA UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA KERJA.
- MENINGKATKAN JUMLAH BALAI LATIHAN KERJA (BLK) BERBASIS PROFESI.
- MENYUSUN PROGRAM DAN MELAKSANAKAN PELATIHAN-PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN BAGI MASYARAKAT DISESUAIKAN DENGAN POTENSI LOKAL.

- MENDORONG PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MILENIAL DI DESA-DESA DALAM PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA/USAHA BARU.

5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TERKAIT PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PPKBPPPA :

- MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTP2A), DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENYIAPKAN TENAGA AHLI PROFESIONAL UNTUK PENDAMPINGAN KORBAN DAN SAKSI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK.
- PENINGKATAN ANGGARAN PENANGANAN STUNTING UNTUK ASUPAN GIZI DAN PENGUATAN TIM PENANGANAN STUNTING DI TINGKAT KECAMATAN.
- PENINGKATAN ANGGARAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.
- MENINGKATKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG MANFAAT KELOMPOK KEGIATAN (BKB, BKR, BKL, UPPKS DAN PIKR) UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
- MENGOPTIMALKAN KAMPUNG KB DAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP).

6. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

TERKAIT KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS, MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ;

- MENINGKATKAN PERAN PEMUDA, PENGEMBANGAN SENI OLAHRAGA, PELESTARIAN BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA, KAMI MEREKOMEDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH AGARA MEMILIKI PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENGUATAN SISTEM PEMBINAAN PRESTASI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, SERTA PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN DALAM KELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA.

- MEREALISASIKAN BANTUAN HIBAH YANG SUDAH TERANGGARKAN PADA TAHUN 2024 UNTUK KELOMPOK PEMUDA, OLAHRAGA, SENI DAN BUDAYA YANG TUMBUH SUBUR DI MASYARAKAT.

7. KONI

KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR KONI MEMILIKI KESERiusAN DAN KESUNGGUHAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN ATLET DI MASING – MASING CABANG OLAHRAGA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA DAN *STAKEHOLDER* LAINNYA, DALAM UPAYA MENCIPTAKAN BAPAK ANGKAT CABANG OLAHRAGA, DAN SUKSES PADA BABAK KUALIFIKASI PORPROV JABAR YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025.

8. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TERKAIT PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN :

- PEMBANGUNAN DEPO ARSIP SESUAI STANDAR DENGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI).
- MENINGKATKAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK
- MENINGKATKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA SEPERTI PENGADAAN BUKU KETERAMPILAN (SKILL) PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN CIAMIS, KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI BPBD :

- MENINGKATKAN ENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DARI MITIGASI BENCANA, AGAR MASYARAKAT MERASA AMAN DAN KESEIMBANGAN ALAM TERJAGA.
- MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA MELALUI PENDEKATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN PADA KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN KAWSAN STRATEGIS LAIINNYA SERTA MENINGKATKAN KETAHANAN AIR DI KAWASAN RAWAN DAN RENTAN TERHADAP BENCANA.

- MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.
- MENAMBAH ALAT BERAT UNTUK MENANGGULANGI KEJADIAN BENCANA.

10. BIDANG KESRA

KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR BAGIAN KESRA MEREALISASIKAN BANTUAN HIBAH TAHUN 2024 YANG SUDAH TERANGGARKAN, DIANTARANYA BELANJA HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEPERTI BELANJA HIBAH KEPADA MASJID, MADRASAH DINIYAH, TPA/TKA/RA, LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM, PONDOK PESANTREN, ORMAS ISLAM DAN YAYASAN ISLAM.

11. BAZNAS

KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS MEREKOMENDASIKAN AGAR MENGOPTIMALKAN PROGRAM LAYANAN UTAMA BAZNAS KABUPATEN CIAMIS MELAKSANAKAN LIMA (5) PROGRAM, YAITU : PROGRAM CIAMIS PEDULI, PROGRAM CIAMIS SEJAHTERA, PROGRAM CIAMIS CERDAS, PROGRAM CIAMIS SEHAT, PROGRAM CIAMIS AGAMIS, DAN MEMINTA BAZNAS UNTUK MEMPUBLIKASIKAN SEMUA PROGRAM YANG TELAH DIREALISASIKAN PADA TAHUN 2024.

KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI SECARA KOMPREHENSIP, SISTEMATIS DAN LENGKAP, KAMI BERUSAHA AGAR REKOMENDASI INI DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG CUKUP MEMADAI UNTUK MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025.

REKOMENDASI INI KAMI SAMPAIKAN, DENGAN MENGEDEPANKAN OBJEKTIVITAS DAN RASIONALITAS, BERBEKAL SEMANGAT DAN KEINGINAN SERTA IKHTIAR DENGAN PENUH KESUNGGUHAN UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN DAN REKOMENDASI YANG DAPAT DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERMUARA PADA MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS.

V. PENUTUP

KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI CIAMIS TAHUN 2024 INI SECARA KOMPREHENSIP, SISTEMATIS DAN LENGKAP, KAMI BERUSAHA AGAR REKOMENDASI INI DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG CUKUP MEMADAI UNTUK MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025.

LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN, DENGAN MENGEDEPANKAN OBJEKTIVITAS DAN RASIONALITAS, BERBEKAL SEMANGAT DAN KEINGINAN SERTA IKHTIAR DENGAN PENUH KESUNGGUHAN UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN DAN REKOMENDASI YANG DAPAT DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERMUARA PADA MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS.

DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI BUAT UNTUK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

CIAMIS, 28 APRIL 2025
KOMISI D DPRD KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



JAENAL ARIFIN